

**ACARA PEMERIKSAAN PERSIDANGAN DAN PERTIMBANGAN
HAKIM PENGADILAN MILITER SURABAYA III-12 DI MALANG
MEMUTUS TINDAK PIDANA DESERSI DALAM WAKTU DAMAI
(STUDI PUTUSAN NOMOR 147-K/PM.III-12/AD/X/2014)**



**Penulisan Hukum
(Skripsi)**

Melengkapi Sebagai Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana Dalam Ilmu
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh :

**CHINITRA SEPTIN PRAWESTI
NIM: E0011067**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2016**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**ACARA PEMERIKSAAN PERSIDANGAN DAN PERTIMBANGAN
HAKIM PENGADILAN MILITER SURABAYA III-12 DI MALANG
MEMUTUS TINDAK PIDANA DESERSI DALAM WAKTU DAMAI
(STUDI PUTUSAN NOMOR 147-K/PM.III-12/AD/X/2014)**

Disusun Oleh :

CHINITRA SEPTIN PRAWESTI

NIM: E0011067

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, 14 November 2016

Dosen Pembimbing

Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H
NIP. 19610721 198803 2001

PENGESAHAN

Penulisan Hukum (Skripsi)

ACARA PEMERIKSAAN PERSIDANGAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN MILITER SURABAYA III-12 DI MALANG MEMUTUS TINDAK PIDANA DESERSI DALAM WAKTU DAMAI (STUDI PUTUSAN NOMOR 147-K/PM.III-12/AD/X/2014)

Disusun Oleh :

CHINITRA SEPTIN PRAWESTI

NIM: E0011067

Telah diterima dan disahkan oleh tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 2 Februari 2016

DEWAN PENGUJI

1. Edy Herdyanto, S.H.,M.H
NIP. 195706291985031002
Ketua
2. Bambang Santoso, S.H.,M.Hum
NIP.196202091989031001
Sekretaris
3. Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H.,M.H
NIP. 196107211988032001
Anggota

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UNS

Prof.Dr.Supanto, S.H.,M.Hum.

NIP. 196011071986011001

PERNYATAAN

Nama : Chinitra Septin Prawesti

NIM : E0011067

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Hukum (skripsi) berjudul: **ACARA PEMERIKSAAN PERSIDANGAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN MILITER SURABAYA III-12 DI MALANG MEMUTUS TINDAK PIDANA DESERSI DALAM WAKTU DAMAI (STUDI PUTUSAN NOMOR 147-K/PM.III-12/AD/X/2014)** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan Hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 14 Januari 2016
Yang membuat pernyataan

Chinitra Septin Prawesti
NIM: E0011067

ABSTRAK

Chinitra Septin Prawesti, E 0011067. 2015 Acara Pemeriksaan Dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya Di Malang, Memutus Tindak Pidana Desersi Dalam Waktu Damai.Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret .

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemeriksaan Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya di Malang, memutus tindak pidana desersi dalam waktu damai dan untuk mengetahui proses pertimbangan Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya di Malang, memutus tindak pidana desersi dalam waktu damai. Pada proses acara pemeriksaan Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan upaya sesuai dengan proses hukum yang berlaku namun terdakwa berhasil diketemukan, kasus tersebut dilimpahkan kepada penyidik Polisi Militer untuk melakukan pemeriksaan berupa penyidikan dalam mencari dan menemukan alat bukti. Setelah berkas dinyatakan lengkap, penyidik melimpahkan berkas tersebut ke Oditur Militer untuk dilimpahkan ke Pengadilan. Oleh karena ini merupakan tindak pidana maka perkara tersebut dilimpahkan melalui Surat Keputusan Pelimpahan Perkara (Skeppera) dari Panglima Kodam selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera). Setelah diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dan dibacakan di depan Pengadilan yang terbuka untuk umum, maka pengadilan membuat pengumuman tentang putusan tersebut dan pembuatan akta putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka Oditur Militer III-12 Surabaya menyampaikan petikan putusan atas nama terdakwa kepada Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankumnya), semua proses acara pemeriksaan tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dan untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Militer Surabaya III-12 Di Malang memutus Tindak Pidana Desersi Dalam Waktu Damai Telah Sesuai Dengan Pasal 171 Jo 199 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Putusan yang dijatuhkan harus memiliki dasar dan pertimbangan yang kuat sehingga dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Dalam putusan hakim aspek pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan hal yang paling penting, dimana pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap putusan hakim. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian Hukum Normatif, dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data dengan menggunakan kepustakaan. Metode analisis data adalah Kualitatif yaitu analisis yang dil dengan memahami, merangkai, atau mengkaji data yang dikumpulkan sistematis.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim , Pengadilan Militer, Disersi

ABSTRACT

Chinitra Septin Prawesti. E 0011067. Interrogation And Military Court Judge Considerations III-12 Surabaya In Malang, Breaking Crime Desertion In Time of Peace. Faculty of Law. Sebelas Maret University.

This study aimed to determine the inspection process the Military Court Judge III-12 Surabaya, Malang, break the criminal offense of desertion in peacetime and to know the process of consideration of the Military Court Judge III-12 Surabaya, Malang, break the criminal offense of desertion in peacetime. In the process of investigation the Military Court Judge III-12 Surabaya has made efforts in accordance with the applicable law, but the accused successfully found, the case is handed over to the Military Police investigators to examine the form of investigation in the search for and find evidence. After the file is declared complete, investigators delegated the file to the Military Judge Advocate to be transferred to the court. Therefore, it is a criminal offense, the case is transferred through the Decree of Delegation Case (Skeppera) as Officers of the Regional Military Commander The hand Case (Papera). Having obtained the legal facts in the hearing the judges convict the defendant and read in front of the Court are open to the public, the court will make an announcement about the decision and deed decision was binding. Once the decision is legally enforceable, the Military Judge Advocate III-12 Surabaya deliver excerpts of the decision on behalf of the defendant to the boss Eligible Punish (Ankumnya), all the examination proceedings in accordance with Law No. 31 of 1997 on Military Justice. And to know the Basics of Surabaya Military Court Judge III-12 In Malang break Crime Desertion In Time Peace Has Jo In accordance with Article 171 199 of Law No. 31 Year 1997 on Military Courts. The verdict handed down should have a base and a strong consideration in order to provide the fairest decision. In the judge's decision considerations juridical aspects of the offenses of which the accused is the most important thing, which is directly juridical considerations will greatly affect the judge's decision. The research conducted is Normative Legal research, by examining library materials is a secondary data derived from primary law materials and secondary law. Data were collected by using a literature study. Qualitative data analysis method is that the analysis is done with understanding, stringing, or reviewing the data collected systematically.

Keywords: Consideration Judge, Military Court, disersi

MOTTO

“Jika kita terhempas karena kritikan, kita akan kehilangan semangat, jika kita terlena akan pujian, kita akan kehilangan arah hidup. Sebaliknya kita menjadikan kritik dan cambuk untuk mengadakan perbaiki-perbaiki dan pujian sebagai bara untuk mengadakan peningkatan-peningkatan”.

(Agus M. Harjana)

PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum ini penulis persembahkan kepada:

ALLAH SWT atas segala karuniaNya dan rahmatNya

Papi dan Mami tercinta

Keluargaku

Rully Candra Abrianto

Sahabat-sahabatku TTNW Okty,Calista,Sindri,Wayan,Nevy,Devi

Anggar Kurniawati sahabatku

Almamaterku, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan penulisan tugas hukum (skripsi) dengan judul **“ACARA PEMERIKSAAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA DI MALANG, MEMUTUS TINDAK PIDANA DESERSI DALAM WAKTU DAMAI”**, dengan baik, Skripsi ini penulis susun guna memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum. Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari bahwa didalam penulisan hukum (skripsi) ini masih banyak kekurangan. Untuk itu penulis dengan besar hati menerima kritik dan saran yang membangun dari semua pihak, sehingga dapat memperkaya isi penulisan hukum ini.

Dengan bantuan dan dorongan dari semua pihak, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, meski masih dengan beberapa sisi kesalahan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu tidak berlebihan kiranya jika dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Supanto S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
2. Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H selaku pembimbing akademik penulis;
3. Bapak Dr. Soehartono S.H., M.Hum selaku ketua bagian Hukum Acara;
4. Ibu Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H selaku pembimbing skripsi penulis yang telah banyak membantu memberikan pengarahan, bimbingan serta saran dalam penulisan hukum ini;
5. Bapak Pasi Intel Yonif Linud 502 yang telah memberikan banyak pengetahuan kepada penulis;

6. Brigade Infanteri Lintas Udara 18 Batalyon Infantri Lintas Udara 502 UJAWALA YUDHA;
7. DENHUB 2, divisi 2 kostrad Malang Jawa Timur yang telah membantu memberikan akses jalan untuk memperoleh informasi kepada penulis;
8. Mami dan Papi penulis yang selalu menyanyangi, mencintai dan mendukung penulisan yang telah sabar sampai selesai menyelesaikan studi ini;
9. Bapak Adri dari jambi yang telah membantu dan memberikan motivasi dan pengetahuan yang sangat baik kepada penulis;
10. Saudara dan seluruh keluargaku yang saya sangat sayangi;
11. Teman-Teman TTNWku terkasih Okty Risa Makartia, Sindri Putri Hanif, Calista Ayu Tunjung Sari, Ni Wayan Satyastuti, Devi Nurlitasari, Nevy Nur Akbar, Dian Setya, Lanang Kujang yang telah memberikan dukungan dan keceriaan dalam saat perkuliahan;
12. Pacarku Tercinta Rully Candra Abrianto yang telah memberikan motivasi semangat dan kadang bikin sebel tapi selalu memberikan yang terbaik buat penulis;
13. Teman-teman fakultas Hukum angkatan 2011;
14. Sahabat-sahabatku ve, dina astri, monica wahyu, merry, juwita, wawan ,safri, puguh, isti, yuris dan semua seluruh jajaran temanku trimakasih;
15. Pemkab kabupaten Karanganyar yang telah membimbing magang pada saat itu selalu memberikan motivasi dan pelajaran bagi kami;

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan penulis Hukum ini masih jauh dari kata sempurna bagi dari segi materi maupun substansinya. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang menunjang bagi kesempurnaan penulis Hukum ini. Akhir kata penulis berharap Penulis Hukum ini dapat bermanfaat bagi

perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, sehingga tidak menjadi suatu karya yang sia-sia nantinya.

Penulis, 14 januari 2016

Chinitra Septin P

E0011067

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
HALAMAN MOTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan Hukum.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori.....	
1. Tinjauan Tentang Sejarah Hukum Pidana Militer	16
2. Tinjauan Tentang Pengertian Tindak Pidana Militer.....	18
3. Tinjauan Tentang Susunan dan Kewenangan Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer	20
4. Tinjauan Tentang Tahapan dalam Penyelesaian Perkara.....	25
5. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Desersi	29
6. Tinjauan Tentang Ketentuan Desersi.....	35
B. Kerangka Pemikiran	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	39
B. pembahasan.....	
1. Kesesuaian Acara Pemeriksaan Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Malang memutus tindak pidana desersi dalam waktu damai	

dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer	48
2. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya memutus Tindak Pidana Desersi Dalam Waktu Damai Dengan Pasal 171 Jo 199 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.....	52
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61

DAFTAR LAMPIRAN

Daftar lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tentara Nasional Indonesia merupakan Warga Negara Indonesia lainnya, memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan wajib menjunjung hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat yang berbunyi: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kekuatan militer dalam suatu negara dapat dipastikan harus selalu ada untuk mendukung dan mempertahankan kesatuan, persatuan serta kedaulatan sebuah negara. Seperti halnya negara-negara di dunia, Indonesia juga mempunyai kekuasaan militer yang disebut dengan Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat TNI). Pengadilan militer sejak bulan juli 2004 berada dibawah makamah agung itu berarti secara organisasi, administrasi dan finansial dibawah makamah agung bukan dibawah mabes TNI. Mabes TNI hanyalah melakukan pembinaan tentang kepangkatan, jabatan maupun pendidikan. Dengan telah beralihnya kewenangan mengenai organisasi dan finansial dibawah makamah agung maka sejak bulan juli 2004 seluruh pertanggung jawaban tugas-tugas satuan yang dipindahkan serta merta ada dibawah tanggung jawab makamah agung. Peradilan militer dengan segala keterbatasannya berada pada satu atap (*one rope system*). Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer tersebut merupakan badan pelaksanaan kekuasaan kehakiman dilingkungan Angkatan Bersenjata, yang memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer,

Tahun 2004 dibentuk Undang-Undang khusus tentang TNI. Rancangan Undang-Undang tentang TNI itu disetujui bersama oleh DPR dan Presiden pada rapat paripurna DPR 30 September 2004. Rancangan Undang-Undang tersebut disahkan dan diundangkan menjadi Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 pada tanggal 19 Oktober 2004. Berdasarkan Undang-Undang tentang TNI ini, jelas

ditentukan bahwa TNI terdiri atas AD, AL dan AU. Masing-masing angkatan dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan. maka pihak pemerintah mengeluarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat UU TNI). Mengenai tugas utama hukum militer diatur dalam Pasal 64 UU Republik Indonesia No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yaitu “Hukum militer dibina dan dikembangkan oleh pemerintah untuk kepentingan penyelenggaraan kepentingan pertahanan negara”.

Setiap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus tunduk dan taat terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi militer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM), dan Peraturan Disiplin Militer (PDM) dan peraturan-peraturan lainnya. Peraturan hukum Militer inilah yang diterapkan kepada Tamtama, Bintara, maupun Perwira yang melakukan suatu tindakan yang merugikan kesatuan, masyarakat umum dan negara yang tidak terlepas dari peraturan lainnya yang berlaku juga bagi masyarakat umum. Anggota Militer yang melakukan salah satu tindak pidana militer dikategorikan tindak pidana murni adalah tindakan desersi. Macam-macam tindak pidana murni prajurit dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (selanjutnya disingkat KUHPM), yaitu meninggalkan dinas dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, meninggalkan tugas-tugas kedinasan yang diperintahkan, melarikan diri dari kesatuan tugasnya selama pertempuran baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja tanpa seizin komandannya. Mengenai proses pemidanaannya berdasarkan Pasal 85 KUHPM, seorang prajurit dapat dijatuhi hukuman kedisiplinan, kurungan hingga pemecatan dari dinas militer.

Proses penyelesaian tindak pidana militer khususnya desersi berbeda dengan tindak pidana umum, letak perbedaannya adalah pada subyeknya bahwa tindak pidana militer dilakukan oleh seorang militer seperti yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Republik Indonesia yaitu prajurit adalah anggota TNI yang terdiri

dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara sedangkan tindak pidana umum dilakukan oleh sipil murni. Tindak pidana desersi disebut juga sebagai tindakan/perbuatan kejahatan ketidakhadiran tanpa ijin seperti yang tercantum dalam Bab III KUHPM pada tingkat permulaan umumnya lebih cenderung merupakan suatu perbuatan yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan militer. Suatu kenyataan sampai saat ini masih banyak ditemukan di kesatuan militer yang personilnya meninggalkan dinastanpa ijin satuan berturut-turut lebih dari 30 (tiga puluh) hari atau desersi.

Tentara Nasional Indonesia berperan sebagai alat negara dibidang pertahanan. Dalam menjalankan tugasnya Tentara Nasional Indonesia berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Tugas pokok Tentara Nasional Indonesia yang sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia : “Menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara”.

Anggota Tentara Nasional Indonesia adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan diatur di dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004. Disamping itu berkewajiban menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan oleh bangsa dan negara untuk melakukan usaha pembelaan negara sebagaimana yang termuat dalam Sumpah Prajurit yaitu :

Demi Allah saya bersumpah/ berjanji :

1. Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Bahwa saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan;
3. Bahwa saya akan taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan;

4. Bahwa saya akan menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tentara dan Negara Republik Indonesia;
5. Bahwa saya akan memegang segala rahasia Tentara sekeras-kerasnya.

Prajurit yang telah berakhir menjalani dinas keprajuritan atau prajurit siswa yang karena suatu hal tidak dilantik menjadi prajurit wajib memegang teguh rahasia tentara walaupun yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat. Dalam menjalankan tugas dan kewajiban prajurit berpedoman pada Kode Etik prajurit dan Kode Etik Perwira. Selain itu juga berpedoman pada Hukum disiplin prajurit yang merupakan serangkaian peraturan dan norma untuk mengatur menegakkan, dan membina disiplin atau tata kehidupan prajurit agar setia tugas dan kewajibannya dapat berjalan dengan sempurna.

Selain Tugas Pokok Tentara Nasional Indonesia dan Sumpah Prajurit, Tentara Nasional Indonesia juga mempunyai Sapta Marga yaitu tujuh pasal yang harus ditaati antara lain :

1. Kami Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila.
2. Kami Patriot Indonesia, pendukung serta pembela Ideologi Negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah.
3. Kami Kesatria Indonesia, yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan.
4. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, adalah Bhayangkari Negara dan Bangsa Indonesia.
5. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit.
6. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada Negara dan Bangsa.
7. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, setia dan menepati janji serta Sumpah Prajurit.

Berdasarkan hal di atas bahwa para prajurit Tentara Nasional Indonesia harus mematuhi peraturan dan taat kepada atasannya. Selain itu, anggota Tentara Nasional Indonesia wajib pula menegakkan kehormatan dan selalu menghindari perbuatan yang dapat menodai nama baik ketentaraan dan kesatuannya. Setiap anggota Tentara Nasional Indonesia yang telah digembleng baik fisik dan mental harus mampu dan dapat diandalkan untuk melaksanakan tugas pokok Tentara Nasional Indonesia baik dalam tugas Operasi Militer untuk perang maupun tugas Operasi Militer Non perang, tentunya tugas berat tersebut haruslah di miliki oleh setiap anggota Tentara Nasional Indonesia untuk bekerja secara professional dan berbasis disiplin yang tinggi.

Ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi setiap anggota Tentara Nasional Indonesia yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (yang selanjutnya disebut KUHPM), Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (yang selanjutnya disebut KUHDM), dan Peraturan Disiplin Militer (yang selanjutnya disebut PDM) dan peraturan-peraturan lainnya. Peraturan hukum tentara inilah yang diterapkan kepada Tamtama, Bintara, maupun Perwira yang melakukan suatu tindakan yang merugikan kesatuan.

KUHPM mengatur tentang jenis pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia yang diatur di dalam Pasal 6 KUHPM yang berbunyi sebagai berikut :

Pidana- pidana yang di tetapkan dalam kitab Undang-Undang ini ialah :

1. Hukuman- Hukuman Pokok
 - a. Hukuman Mati
 - b. Hukuman Penjara
 - c. Hukuman Kurungan
2. Hukuman- Hukuman Tambahan
 - a. Pemecatan dari dinas tentara dengan disertai atau tidak disertai pencabutan hak bekerja pada kekuasaan bersenjata.
 - b. Penurunan pangkat
 - c. Pencabutan hak-hak yang disebutkan dalam Pasal 35 ayat (1) pada Nomor 1, 2 dan 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Salah satu tindak pidana yang diancamkan kepada para anggota Tentara Nasional Indonesia dikelompokkan pada Bab III KUHPM tentang kejahatan-kejahatan seperti yang disebabkan karena anggota Tentara Nasional Indonesia itu sendiri menghindarkan diri untuk tidak memenuhi kewajiban-kewajiban dinas, salah satunya mengenai desersi. Tindak pidana desersi diatur di dalam Pasal 87 KUHPM yang berbunyi sebagai berikut :

Dihukum sebagai bersalah karena desersi, anggota tentara yang:

1. Pergi dengan maksud menarik diri untuk selama-lamanya dalam memenuhi kewajiban-kewajiban dinas, menghindari bahaya perang, menyeberang pada musuh, atau tanpa hak untuk itu masuk dinas dalam tentara dari Negara atau kekuasaan lain.
2. Karena salahnya atau dengan sengaja tidak hadir secara tidak sah dimasa damai lebih dari tiga puluh hari dan keadaan perang lebih dari empat hari lamanya.
3. Bersalah karena dengan sengaja tidak hadir secara tidak sah dan karena itu menyebabkan ia sama sekali atau hanya sebagian saja tidak turut serta dalam suatu perjalanan yang telah diperintahkan seperti yang disebutkan dalam Pasal 85 ayat (2) KUHPM.

Pasal 85 ayat (2) KUHPM menjelaskan mengenai pemberian sanksi apabila desersi itu dilakukan di masa damai dihukum dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan. Tetapi pidana itu akan diperberat apabila desersi itu dilakukan dimasa perang sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (3) tersebut yang mengancam dengan pidana penjara selama-lamanya delapan tahun enam bulan. Dalam hal ini apabila seorang Anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana, baik tindak pidana umum maupun tindak pidana militer sebagaimana terdapat dalam KUHPM, diadili oleh Peradilan Militer (SPPM), tetapi dengan keluarnya Ketetapan MPR RI Nomor : VII/MPR/2000, khususnya Pasal 3 Ayat (4) huruf a yang berbunyi, Prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran kekuasaan peradilan militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.

Berdasarkan hal di atas setiap anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana militer akan tunduk pada Peradilan Militer dan diproses melalui mekanisme Sistem Peradilan Pidana Militer (SPPM) dengan komponen (subsistem) terdiri dari Ankuam, Papera, Polisi Militer, Oditur Militer, Hakim Militer, dan Petugas Pemasyarakatan Militer. Sedangkan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana umum akan diadili di peradilan umum dan diproses melalui mekanisme Sistem Peradilan Pidana Umum (SPPU) dengan komponen (subsistem) terdiri dari Polisi selaku penyidik, Jaksa selaku penuntut, Hakim, dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan.

Anggota Tentara Nasional Indonesia melakukan desersi, maka dalam hal ini anggota Tentara Nasional Indonesia tersebut akan diproses secara militer yang memang perbuatan tersebut telah diatur dalam KUHPM. Dengan demikian semua proses pemeriksaan tersebut dilakukan melalui mekanisme Sistem Peradilan Pidana Militer (SPPM) dengan komponen (subsistem) terdiri dari Ankuam, Papera, Polisi Militer, Oditur Militer, Hakim Militer, dan Petugas Pemasyarakatan Militer. Dimana masing-masing bagian tersebut memiliki tugas dan kewenangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam Undang-undang peradilan militer yang dimaksud penyidik adalah angkatan bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut penyidik adalah Atasan yang Berhak Menghukum, pejabat Polisi Militer tertentu, dan Oditur yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang ini untuk melakukan penyidikan.

Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sekecil mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Oleh karena itu hakim tidak berarti dapat berbuat sesuka hatinya, melainkan hakim juga harus mempertanggung jawabkan putusannya. Dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara pidana, seharusnya putusan hakim tersebut berisi alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang bisa memberikan rasa keadilan bagi terdakwa. Dimana dalam pertimbangan-pertimbangan itu dapat dibaca motivasi yang jelas dari tujuan putusan diambil, yaitu untuk menegakkan hukum (kepastian hukum) dan

memberikan keadilan.

Pertimbangan hakim sebenarnya tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan bagian amar putusan hakim dan justru bagian pertimbangan itulah yang menjadi roh dari seluruh materi isi putusan, bahkan putusan yang tidak memuat pertimbangan yang cukup dapat menjadi alasan untuk diajukannya suatu upaya hukum baik itu banding maupun kasasi, yang dapat menimbulkan potensi putusan tersebut akan dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Dalam penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana, pada dasarnya haruslah mempertimbangkan segala aspek tujuan (Nanda Agung Dewantara, 1987:50), yaitu sebagai berikut :

1. Sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari ancaman suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelakunya;
2. Sebagai upaya represif agar penjatuhan pidana membuat pelakunya jera dan tidak akan melakukan tindak pidana dikemudian hari;
3. Sebagai upaya preventif agar masyarakat luas tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh pelakunya;
4. Mempersiapkan mental masyarakat dalam menyikapi suatu kejahatan dan pelaku kejahatan tersebut, sehingga pada saatnya nanti pelaku tindak pidana dapat diterima dalam pergaulan masyarakat.

Proses penjatuhan putusan yang diberikan hakim merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit, sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Dalam proses penjatuhan putusan tersebut, seorang hakim harus meyakini apakah seorang terdakwa melakukan tindak pidana ataukah tidak, dengan tetap berpedoman pada pembuktian untuk menentukan kesalahan dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Setelah menerima dan memeriksa suatu perkara, selanjutnya hakim akan menjatuhkan keputusan, yang dinamakan dengan putusan hakim, pernyataan hakim yang merupakan sebagai pernyataan pejabat negara yang diberi wewenang untuk putusan itu. Jadi putusan hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja, melainkan juga didasarkan pada hati nurani.

Bahwa terdakwa awalnya cuti untuk pulang ke kampung halamannya untuk menjenguk ibunya yang sedang sakit dirumah sakit Makasar Sulawesi sejak 20 juli 2013 samapai tanggal 27 juli 2013 ,terdakwa minta tambahan ijin selama 2 (dua) hari kepada Danki B, bahwa setelah ijinya habis terdakwa tidak kembali kekesatuan sejak tanggal 30 juli 2013 sampai tanggal 25 february 2014. Dimana terdakwa telah melakukan tindak pidana desersi karena meninggalkan satuan 30 hari berturut-turut tanpa ijin dan menghilang tanpa adanya kabar kekesatuan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan desersi, hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang baik maupun hal-hal yang buruk dari pelaku tindak pidana desersi. Adanya perbedaan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana desersi, hal inilah yang menjadikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“ACARA PEMERIKSAAN PERSIDANGAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN MILITER SURABAYA III-12 DI MALANG MEMUTUS TINDAK PIDANA DESERSI DALAM WAKTU DAMAI” (Studi Putusan Nomor 147-K/PM.III-12/AD/X/2014).**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah pemeriksaan persidangan terhadap Terdakwa pelaku tindak pidana desersi dalam waktu damai telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ?
2. Apakah pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Militer menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana desersi dalam waktu damai telah sesuai dengan Pasal 171 jo Pasal 199 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan target yang ingin dicapai sebagai pemecahan atas berbagai masalah, Suatu kegiatan penelitian haruslah mempunyai tujuan yang jelas sebagai target yang ingin dicapai dalam upaya pemecahan masalah yang dihadapi. Tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penulisan hukum ini terdiri dari tujuan obyektif dan tujuan subyektif. Adapun tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui Proses acara pemeriksaan persidangan terhadap Terdakwa pelaku tindak pidana desersi dalam waktu damai telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Militer menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa pelaku tindak pidana desersi dalam waktu damai telah sesuai dengan Pasal 171 Jo 199 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan dan pengalaman penulis dalam bidang Hukum Acara, serta pemahaman aspek hukum dalam teori dan praktek lapangan hukum yang sangat berarti bagi penulis sendiri khususnya dan dapat memberi manfaat bagi masyarakat luas.
- b. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar sarjana di bidang ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan atau literatur hukum dan manfaat sebagai titik tolak dalam

pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya tentang penyelesaian hukum terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana disersi.

- b. Diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat yang ingin mengetahui penyelesaian hukum Terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana disersi.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan Tambahan masukan dan pengetahuan kepada pihak-pihak terkait dengan masalah yang sedang diteliti, juga kepada pihak yang berminat pada permasalahan yang sama .
- b. Diharapkan dapat mengembangkan penalaran, pola pikir dinamis dan mengetahui kemampuan penulis dalam merapikan ilmu hukum yang diperoleh.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum (*legal research*) adalah suatu proses untuk menentukan kebenaran koherensi, yaitu menentukan apakah aturan hukum yang ada sudah sesuai dengan norma hukum, apakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum dan apakah tindakan seseorang sudah sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 47).

Metode penelitian sangat penting dalam penelitian hukum kerana untuk memperoleh data dengan kegunaan dan tujuan tertentu. Yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Ditinjau dari sudut penelitian hukum itu sendiri, maka pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian ini adalah penelitian hukum yang merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum,

prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2006:35).

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam hal ini adalah prespektif dan terapan. Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat prespektif dan terapan sebagai ilmu yang bersifat perspektif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2006:22).

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan didalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-Undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptuan (*conceptual approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 133)

Berdasarkan kelima jenis pendekatan penelitian yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki tersebut diatas, jenis pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) sebagai pendekatan yang paling relevan karena pendekatan kasus tersebut dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Peter Mahmud Marzuki, 2011:95).

4. Jenis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini bahan hukum yang dipakai adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Sedangkan bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan oleh penulis berupa data sekunder, yaitu data atau informasi hasil menelaah dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, bahkan kepastakaan seperti buku-buku, literatur, jurnal maupun arsip-arsip yang berkesesuaian dengan penelitian yang dibahas.

5. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan yang memiliki otoritas atau kekuasaan dalam pelaksanaannya. Yang termasuk bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan, catatan resmi yang berkaitan dengan hukum, publikasi hukum tersebut meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Sehingga dalam hal ini yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penulisa hukum ini penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu:

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat terdiri:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, amandemen ke 4;
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Hukum Pidana Militer disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM);
- 3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1982 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

- 5) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
- 6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 7) Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 147-K/PM.III-12/AD/X/2014.

b. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer :

- 1) Hasil karya ilmiah yang relevan/terkait dalam penelitian ini.
- 2) Hasil-hasil penelitian yang terkait/relevan dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah dalam melakukan pembahasan, penganalisaan serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan hukum ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan mengemukakan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum (skripsi).

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai kerangka teori dan kerangka pemikiran disampaikan dengan bagan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Tinjauan pustaka tersebut meliputi, tinjauan tentang sejarah hukum pidana militer, pengertian tindak pidana militer, susunan dan kewenangan pengadilan dalam lingkungan peradilan, tahapan dalam penyelesaian perkara, pengertian desersi dan ketentuan desersi.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan dan menyajikan tentang hasil penelitian beserta pembahasan berdasarkan rumusan masalah, yaitu tentang pemeriksaan persidangan dan pertimbangan hukum hakim terhadap terdakwa pelaku tindak pidana desersi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

BAB IV PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

TINAJUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Tentang Sejarah Hukum Pidana Militer

Peraturan pertama hukum militer yang dikeluarkan pemerintah adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1946 tentang Pengadilan Tentara yang mulai berlaku sejak tanggal 8 Juni 1946. UU RI Nomor 7 Tahun 1946 tentang Pengadilan Tentara ini dikeluarkan mengingat banyaknya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh prajurit-prajurit Indonesia pada waktu itu. Tidak disadari bahwa fungsi hukum acara atau hukum formal adalah untuk melaksanakan hukum materiil, padahal hukum materiilnya belum ada. Akibatnya bahwa Undang-Undang itu tidak dapat dilaksanakan.

Pemerintah menyadari bahwa UU RI Nomor 7 Tahun 1946 tentang Pengadilan Tentara tidak dapat dilaksanakan dan dibuatlah peraturan pertama mengenai hukum pidana militer yaitu UU RI Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Tentara (selanjutnya disingkat KUHPT) yang diumumkan pada tanggal 27 Desember 1947. Selama masa darurat Tahun 1945 sampai Tahun 1948 Undang-Undang mengenai hukum militer yang dikeluarkan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan (A. Mulya Sumaperwata. 2007: 52), yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1947 tentang Pengadilan Tentara.
- b. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1947 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara.
- c. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1947 tentang Peradilan Tentara.
- d. Undang-Undang Nomor 47 tahun 1947 tentang Kependudukan Tentara.
- e. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara.

- f. Undang-Undang Nomor 40 tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Tentara (KUHDT).
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1947 tentang Sumpah Jabatan Hakim, Jaksa, Panitera pada Pengadilan Tentara.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1948 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri dan Anggota Angkatan Perang.
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1948 tentang Peraturan Permohonan Grasi.
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1948 tentang Peraturan Disiplin Tentara.

Akhir Tahun 1956 dan selama Tahun 1957, gangguan keamanan semakin meningkat sehingga pada awal Tahun 1957 pemerintah terpaksa menyatakan berlakunya hukum darurat untuk seluruh daerah Indonesia. Gangguan keamanan itu berpuncak pada pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia/ Perjuangan Rakyat Semesta (PRRI/PERMESTA) pada awal Tahun 1958. Dalam hubungan ini perlu diterangkan bahwa hukum darurat yang lebih dikenal dengan *Staat Van Oorlog en Beleg* (SOB) telah mengalami dua kali perubahan, yang pertama pada Tahun 1957 dan kemudian pada Tahun 1959 UU RI Nomor 47 Tahun 1957, LN Tahun 1957 Nomor 160 dan UU RI Nomor 23/PRP Tahun 1959, LN Tahun 1959 Nomor 139 (A. Mulya Sumaperwata. 2007: 1-52).

Pertengahan Tahun 1963 dapat dikatakan bahwa gangguan keamanan berupa pemberontakan telah berakhir. Dengan Penetapan Presiden Nomor 16 Tahun 1963 di bentuk Mahkamah Militer Luar Biasa (selanjutnya disingkat MAHMILUB), pertama dimaksud untuk mengadili Sumokil tokoh utama pemberontakan Republik Maluku Selatan dan kemudian untuk mengadili Karto Suwirjo dan tokoh-tokoh DI / TII. Kemudian pada Tahun 1963/1964 diadakan dua seminar yaitu Seminar Hukum Nasional dan Seminar Hukum Militer Nasional.

Tahun 1974 tentang Pertahanan Negara yang kemudian disempurnakan dengan UU RI Nomor 20 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pertahanan Keamanan Negara yang kemudian diubah dengan UU RI Nomor 1 Tahun 1988 dan kemudian diganti oleh UU RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Persoalan-persoalan militer menjadi pusat perhatian masyarakat Indonesia terutama disebabkan usaha perjuangan untuk merebut kembali Irian Barat dari tangan Belanda, perintah Presiden Soekarno untuk menyerbu Kalimantan Utara. Puncaknya terjadi setelah terjadi pemberontakan Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (selanjutnya disingkat Gestapu/PKI). Perkara-perkara yang menyangkut Gestapu/PKI diadili MAHMILUB. Perkembangan kemudian menunjukkan bahwa badan-badan Peradilan Militer, setelah zaman reformasi dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) No.VII/MPR/2000 Kepolisian Republik Indonesia dipisah dari Tentara Nasional Indonesia dan kepada para anggotanya berlaku hukum umum (A. Mulya Sumaperwata. 2007: 1-52).

2. Tinjauan Tentang Pengertian Tindak Pidana Militer

Tindak pidana militer pada umumnya dibagi dua bagian pokok yaitu tindak pidana militer murni dan tindak pidana militer campuran. Tindak pidana desersi atau sering disebut kejahatan desersi merupakan salah satu contoh dari tindak pidana militer murni, artinya dikatakan murni adalah bahwa tindakan-tindakan terlarang/diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaan yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana. Disebutkan pada prinsipnya nanti dalam uraian-uraian tindak pidana tersebut, ada perluasan subjek militer tersebut.

Hukum pidana militer dalam arti material dan formal ditinjau dari sudut *justisiabel* adalah bagian dari hukum positif, yang berlaku bagi *justisiabel* peradilan militer, yang menentukan dasar-dasar dan peraturan-

peraturan tentang tindakan-tindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana, yang menentukan dalam hal apa dan bilamana pelanggar dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang menentukan juga cara penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana, demi tercapainya keadilan dan ketertiban hukum(S. R. Sianturi. 2010: 18).

Secara singkat hukum pidana militer dalam arti materiil yaitu yang terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (selanjutnya disingkat KUHPM) dan dalam arti formal yaitu UU Hukum Acara Pidana Militer (UU No. 1 Drt. Tahun 1958) dan perundang-undangan lainnya seperti UU tentang pelaksanaan pidana mati, peraturan-peraturan tentang ke-PAPERA-an. (S. R. Sianturi. 2010: 17).

Hukum pidana militer sebagai hukum khusus yang berlaku bagi golongan militer dan yang dipersamakan serta juga berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana umum.Dari pengertian di atas bahwa semua itu didasarkan kepada siapa hukum pidana tersebut berlaku. Jadi bukan mendasari hukum pidana apa saja yang berlaku bagi *justisiabel* tersebut. Hukum pidana militer adalah salah satu hukum pidana yang secara khusus berlaku bagi militer (dan yang dipersamakan) di samping berlakunya hukum pidana lainnya(Moch. Faisal Salam, 2006: 26-39).

Tindak pidana militer pada umumnya terdapat dalam KUHPM terdapat dua bagian yaitu :

- a. Tindak pidana militer murni (*Zuiver Militeire Delict*)
- b. Tindak Pidana Militer Campuran (*Gemengde Militeire Delict*). (S. R. Sianturi. 2010:19).

Tindak pidana militer murni adalah merupakan tindakan terlarang/diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaannya yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana(E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 1985:22)

- a. Contoh tindak pidana murni antara lain :

- 1) Seorang militer yang dalam keadaan perang dengan sengaja menyerahkan seluruhnya atau sebagian suatu pos yang diperkuat, kepada musuh tanpa usaha mempertahankannya sebagaimana dituntut / diharuskan dari padanya.
- 2) Kejahatan desersi (meninggalkan dinas tanpa ijin lebih dari 30 hari berturut-turut).
- 3) Meninggalkan pos penjagaan.

Tindak Pidana Militer Campuran adalah tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lainnya, akan tetapi diatur lagi dalam KUHPM atau dalam perundang-undangan lainnya. Karena adanya sesuatu keadaan yang khas militer atau karena adanya sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman pidana pada kejahatan semula dengan pemberatan tersebut dalam Pasal 52 KUHP (A. Mulya Sumaperwata, 2007: 90). Alasan pemberatan tersebut adalah karena ancaman pidana dalam uu hukum pidana umum itu dirasakan kurang memenuhi keadilan, mengingat hal-hal khusus yang melekat bagi seorang militer. Misalnya : seorang militer sengaja dipersenjatai untuk menjaga keamanan, malahan justru ia mempergunakan senjata tersebut untuk memberontak, para militer ditempatkan dalam suatu *chembre* tanpa dibatasi oleh tembok/dinding karena pada mereka telah di pupuk rasa korsa (*corps geist*) akan tetapi justru salah satu dari mereka melakukan pencurian di *chembre* tersebut.

3. Tinjauan Tentang Susunan dan Kewenangan Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer dibagi menjadi 4 (empat) dan masing-masing pengadilan, memiliki kompetensi yang berbeda dalam hal memeriksa dan memutus perkara, yaitu :

a. Pengadilan Militer

Berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwaanya berpangkat Kapten kebawah.

Berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang No. 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, bahwa kekuasaan pengadilan militer yaitu pengadilan militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwaanya adalah :

- 1) Prajurit yang berpangkat kapten kebawah
- 2) Mereka yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c yang terdakwaanya termasuk dalam tingkat kepangkatan kapten ke bawah
- 3) Mereka berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf d harus diadili oleh pengadilan militer

b. Pengadilan Militer Tinggi

Berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwaanya berpangkat Mayor keatas dan memeriksa serta memutus pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Militer yang dimintakan banding, selain itu Pengadilan Militer Tinggi berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.

Peradilan Militer , bahwa kekuasaan pengadilan militer yaitu : pengadilan militer tinggi pada tingkat pertama ;

- 1) Memeriksa dan memutus perkara pidana yang terdakwaanya adalah :
 - a) Prajurit atau salah satu prajuritnya berpangkat mayor ke atas
 - b) Mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasa 19 angka 1 huruf b dan huruf c yang terdakwaanya atau salah terdakwaanya termasuk tingkat kepangkatan mayor ke atas
 - c) Mereka berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf d harus diadii oleh pengadilan militer tinggi

- 2) Pengadilan militer tinggi memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana yang diputus oleh pengadilan militer dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding
- 3) Pengadilan militer tinggi memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan militer dalam daerah hukumnya.

c. Pengadilan Militer Utama

Berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang telah diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi yang dimintakan banding.

Berdasarkan Pasal 42, 43 dan 44 UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, bahwa kekuasaan kehakiman pengadilan militer yaitu :

- 1) Pasal 42, bahwa Pengadilan Militer Utama memeriksa dan memutuskan pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan bersenjata yang telah diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi yang dimintakan banding.
- 2) Pasal 43, bahwa :
 - a) Pengadilan Militer Utama memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili :
 - (1) Antar pengadilan militer yang berkedudukan di daerah hukum pengadilan militer tinggi yang berlainan
 - (2) Antar pengadilan militer tinggi
 - (3) Antara pengadilan militer tinggi dan pengadilan militer
 - b) Sengketa sebagaimana dimaksud di atas terjadi :

- (1) Apabila dua pengadilan atau lebih menyatakan dirinya berwenang mengadili atas perkara yang sama.
 - (2) Apabila dua pengadilan atau lebih menyatakan dirinya berwenang mengadili perkara yang sama.
- 3) Pasal 44,
- 1) Pengadilan Militer Utama melakukan pengawasan terhadap:
 - a) Penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Pertempuran di daerah hukumnya masing-masing
 - b) Tingkah laku dan perbuatan para Hakim dalam menjalankan tugasnya
 - 2) Pengadilan Militer Utama berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Pertempuran
 - 3) Pengadilan Militer Utama memberi petunjuk, teguran atau peringatan yang dipandang perlu kepada Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Pertempuran
 - 4) Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 tidak mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara
 - 5) Pengadilan Militer Utama meneruskan perkara yang dimohonkan kasasi, peninjauan kembali dan grasi kepada Mahkamah Agung.

d. Pengadilan Militer Pertempuran

Berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang dilakukan di daerah pertempuran, Pengadilan Militer Pertempuran bersifat mobil mengikuti gerakan pasukan dan berkedudukan serta berdaerah hukum di daerah pertempuran. (A. Mulya Sumaperwata, 2007: 55-56).

Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer Pasal 45 dan Pasal 46, bahwa kekuasaan pengadilan militer pertempuran yaitu :

- 1) Pasal 45, bahwa pengadilan militer pertempuran memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang telah dilakukan oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 di daerah pertempuran.
- 2) Pasal 46, bahwa pengadilan militer pertempuran bersifat mobil mengikuti gerakan pertempuran dan berkedudukan serta berda di daerah pertempuran.

Harold Hongju Koh dalam jurnalnya yang berjudul *The Case again military commissions* menyebutkan bahwa:

“military justice is the body of laws and procedures governing members of the armed forces. Many states have separate and distinct bodies of law that govern the conduct of members of their armed forces. Some states use special judicial and other arrangement to enforce these laws, while others use civilian judicial systems. Legal issues unique to military justice include the preservation of good order and discipline, the legality of orders, and appropriate conduct of members of the military. Some states enable their military justice systems to deal with civil offenses committed by their armed forces in some circumstances”.

Harold menyatakan bahwa peradilan militer adalah badan hukum dan prosedur yang mengatur anggota pasukan bersenjata. Banyak negara memiliki tubuh terpisah dan berbeda dari hukum yang mengatur perilaku anggota angkatan bersenjata mereka. Beberapa negara menggunakan pengaturan peradilan dan lainnya khusus untuk menegakkan hukum-hukum, sementara yang lain menggunakan sistem peradilan sipil. Masalah hukum yang unik untuk peradilan militer termasuk pelestarian ketertiban

dan disiplin, legalitas pemerintah, dan perilaku yang sesuai untuk anggota militer. Beberapa negara memungkinkan sistem peradilan militer mereka untuk menangani pelanggaran sipil yang dilakukan oleh angkatan bersenjata mereka dalam beberapa keadaan.

4. Tinjauan Tentang Tahapan dalam Penyelesaian Perkara

Tahapan-tahapan hukum acara pidana militer tidak terlalu berbeda dengan yang terdapat dalam hukum acara pidana umum, yaitu mencakup hal-hal sebagai berikut :

a. Tahap Penyidikan

Penyidik dalam hukum acara pidana militer adalah terdiri dari Atasan Yang Berhak Menghukum (selanjutnya disingkat Ankum), Polisi Militer, dan Oditur. Kewenangan penyidikan yang ada pada Ankum tidak serta merta dilaksanakan sendiri melainkan pelaksanaannya oleh penyidik Polisi Militer dan/atau Oditur.

Hukum acara pidana militer tidak secara khusus mengatur tentang penyelidikan sebagai salah satu tahap penyidikan, karena penyidikan merupakan fungsi yang melekat pada komandan dan pelaksanaannya dilakukan oleh penyidik Polisi Militer. Dalam kata lain fungsi penyelidikan ada pada setiap komandan terhadap anak buahnya melalui para perwira yang berada dibawah kendalinya.

Ankum dan Perwira Penyerah Perkara (selanjutnya disingkat Papera) memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan, Ankum berwenang melakukan penahanan sementara selama 20 (dua puluh) hari, dan Papera berwenang melakukan perpanjangan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari dapat diperpanjang lagi berturut-turut selama 6 x 30 (tiga puluh) hari = 180 (seratus delapan puluh) hari, yang pelaksanaannya dilakukan di rumah tahanan militer, karena dilingkungan peradilan militer hanya dikenal satu jenis tahanan yaitu penahanan di rumah tahanan militer (A. Mulya Sumaperwata, 2007:65-67).

Seorang penyidik berwenang melakukan penangkapan. Penangkapan terhadap tersangka di luar tempat kedudukan Ankum yang langsung membawanya dapat dilakukan oleh penyidik setempat ditempat tersangka ditemukan, berdasarkan permintaan dari Penyidik yang menangani perkaranya. Pelaksanaan penangkapan dilakukan dengan surat perintah. Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah, penggeledahan pakaian, atau penggeledahan badan dan penyitaan. Pelaksanaan penyitaan dilakukan dengan surat perintah. Dalam penyelidikan, Penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi apabila benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.

b. Tahap Penyerahan Perkara

Wewenang penyerah perkara kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum ada pada Papera. Dalam hukum acara pidana militer, tahap penuntutan termasuk dalam tahap penyerahan perkara, dan pelaksanaan penuntutan dilakukan oleh Oditur yang secara teknis yuridis bertanggung jawab kepada Oditur Jederal, sedangkan secara operasional justisial bertanggung jawab kepada Papera. (A. Mulya Sumaperwata, 2007:65-67)

Pasal 122 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1997 : “Perwira yang menyerahkan perkara adalah Panglima, Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Pasal 123 ayat (3) UU RI No. 31 Tahun 1977 : “Panglima selaku Perwira Penyerah Perkara tertinggi melakukan pengawasan dan

pengendalian penggunaan wewenang penyerahan perkara oleh Perwira Penyerah Perkara lainnya”.

Pasal 126 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1977 :

Berdasarkan pendapat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1), Perwira Penyerah Perkara mengeluarkan :

- 1) Surat Keputusan Penyerahan Perkara
- 2) Surat Keputusan tentang Penyelesaian menurut Hukum Disiplin Prajurit; atau
- 3) Surat Keputusan Penutupan Perkara demi kepentingan hukum

c. Tahap Pemeriksaan Dalam Persidangan

1) Persiapan Persidangan

Pasal 132 UU RI No. 31 Tahun 1997 :

Sesudah Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi menerima pelimpahan berkas perkara dari Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi, Kepala Pengadilan Militer/Kepala Pengadilan Militer Tinggi segera mempelajarinya, apakah perkara itu termasuk wewenang Pengadilan yang dipimpinnya.

2) Penahanan

Pasal 137 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1997 :

Dalam pemeriksaan sidang tingkat pertama pada Pengadilan Militer / Pengadilan Militer Tinggi, Hakim Ketua berwenang :

- (a) Apabila Terdakwa berada dalam tahanan sementara, wajib menetapkan apakah Terdakwa tetap ditahan atau dikeluarkan dari tahanan sementara
- (b) Guna kepentingan pemeriksaan, mengeluarkan perintah untuk menahan Terdakwa paling lama 30 (tiga puluh) hari.

3) Pemanggilan

Oditur mengeluarkan surat panggilan kepada Terdakwa dan Saksi yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat sidang, dan untuk perkara apa mereka dipanggil. Surat panggilan harus sudah

diterima oleh Terdakwa atau Saksi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang dimulai. Apabila yang dipanggil di luar negeri, pemanggilan dilakukan melalui perwakilan Republik Indonesia di tempat orang yang dipanggil itu biasa berdiam, sebagaimana dimaksud pada Pasal 139 UU RI No. 31 Tahun 1997.

4) Pemeriksaan dan Pembuktian

Dalam pemeriksaan Terdakwa yang tidak ditahan dan tidak hadir pada hari sidang yang sudah ditetapkan, Hakim Ketua meneliti apakah Terdakwa sudah dipanggil secara sah. Jika terdakwa dipanggil secara tidak sah, Hakim Ketua menunda persidangan dan memerintahkan supaya Terdakwa dipanggil lagi untuk hadir pada hari sidang berikutnya. Apabila terdakwa sudah dipanggil secara sah tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, Hakim Ketua memerintahkan supaya Terdakwa dihadirkan secara paksa pada sidang berikutnya. Apabila Terdakwa lebih dari 1 (satu) orang dan tidak semua hadir pada hari sidang, pemeriksaan terhadap yang hadir dapat dilangsungkan. Panitera mencatat laporan dari Oditur mengenai pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) kemudian menyampaikannya kepada Hakim Ketua (UU No. 31 tahun 1997 Pasal 142).

Berkenaan dengan pembuktian dalam Pasal 172 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer :

(1) Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Keterangan terdakwa
- d. Surat
- e. Petunjuk

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

5) Penuntutan dan Pembelaan

Sesudah pemeriksaan dinyatakan selesai, Oditur mengajukan tuntutan pidana.

c. Tahap Pelaksanaan Putusan

Pengawasan terhadap pelaksanaan putusan hakim dilaksanakan oleh Kepala Pengadilan pada tingkat pertama dan khusus pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat dilakukan dengan bantuan komandan yang bersangkutan, sehingga komandan dapat memberikan bimbingan supaya terpidana kembali menjadi militer yang baik dan tidak akan melakukan tindak pidana lagi. Khusus dalam pelaksanaan putusan ganti rugi dalam perkara pidana dilaksanakan oleh Kepala Kepaniteraan sebagai juru sita (A. Mulya Sumaperwata, 2007: 67).

5. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Desertasi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, desersi adalah perbuatan meninggalkan dinas ketentaraan, pembelotan kemusuh, perbuatan lari dan memihak musuh. Sedangkan orang yang melakukan desersi di sebut sebagai desertir. (Departemen Pendidikan Nasional, 2005 :257) Namun menurut KUHPM bahwa bentuk semula dari desersi adalah militer tanpa ijin menjauhkan diri dengan tujuan untuk selama-lamanya menghindarkan diri dari tugas kewajibannya.

Robi amu dalam jurnalnya yang berjudul “ Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi” menyatakan bahwa desersi adalah tidak beradanya seorang militer tanpa ijin atasannya langsung, pada suatu tempat dan waktu yang sudah ditentukan oleh dinas, dengan lari dari kesatuan dan meninggalkan dinas kemiliteran, atau keluar dengan cara pergi melarikan diri tanpa ijin. Tindak pidana desersi merupakan suatu tindak pidana yang secara khusus dilakukan oleh seorang militer karena bersifat melawan hukum dan bertentangan dengan undang-undang khususnya hukum pidana militer.

Pasal 87 ayat 1 ke 1 KUHPM yang berbunyi :“Yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasny, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu”(S. R. Sianturi. 2010:272).

Hal itu dinyatakan sebagai persyaratan pertama desersi dan maksud pelaku diawali dengan perbuatan pergi. Dalam penerapannya perbuatan pergi ternyata oleh pembuat Undang-Undang tidaklah harus sudah terwujud seluruhnya maksud itu, baru dapat diterapkan pasal ini. Namun dapat disimpulkan menarik diri untuk selamanya artinya kalau petindak itu sudah mati, barulah secara pasti dapat dikatakan ia tidak mungkin lagi dapat kembali atau ditangkap untuk dikembalikan ke tempat tugasnya. Dalam hal ini bukanlah dimaksudkan untuk mengancamkan pidana kepada yang mati, akan tetapi kesimpulannya ialah bahwa jika dari suatu kenyataan-kenyataan yang terjadi yang mengikuti atau berbarengan dengan perbuatan pergi, sudah dapat dipastikan sesuatu dianggap bahwa kelanjutan dari kenyataan-kenyataan tersebut tidak lain dari pada proses perwujudan maksud pelaku. Oleh karenanya Pasal 87 ayat (1) ke-1 KUHPM sudah dapat diterapkan kepada pelaku tersebut(S. R. Sianturi. 2010:274).

Dengan demikian maka penjelasan dari beberapa maksud pelaku adalah sebagai berikut :

- a. Menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasny.

Artinya dari untuk selamanya ialah tidak akan kembali lagi ketempat tugasnya. Dari suatu kenyataan bahwa pelaku telah bekerja pada suatu jawatan atau perusahaan tertentu tanpa suatu perjanjian dengan kepala perusahaan tersebut maka pekerjaan tersebut bersifat sementara sebelum ia kembali ke kesatuannya, sudah dapat diartikan sebagai pergi untuk selamanya. Bahkan jika petindak itu sebelum pergi sudah mengatakan tekadnya kepada seseorang teman dekatnya tentang maksudnya itu. Kemudian tidak lama setelah pergi ia ditangkap oleh

petugas, maka kejadian tersebut sudah termasuk kejahatan desersi. Karena kesulitan-kesulitan usaha pembuktian tentang unsur kejiwaan yang dalam hal ini maksud pelaku, maka baik dalam proses verbal maupun dalam surat tuntutan harus secara jelas disebutkan kenyataan-kenyataan yang dari padanya dapat disimpulkan maksud pelaku. Dari kewajiban-kewajiban dinas, jika pelaku itu pergi dari kesatuannya, lalu menggabungkan diri pada kesatuan militer lainnya, dilihat dari sudut maksud kepergiannya untuk selamanya dari kesatuannya semula, secara harfiah perbuatan itu adalah desersi. Akan tetapi dilihat dari sudut maksud kepergiannya dihubungkan dengan kewajiban dinas, maka maksud kepergiannya itu tidak dapat dikatakan sebagai menarik diri untuk selamanya dan seterusnya. Karena pada kesatuan yang baru itu juga ia kan menjalankan tugas kewajiban yang sama. Selain dari pada itu dari kesatuan yang baru ini petindak masih dapat dikembalikan ke kesatuan asalnya. Untuk istilah kewajiban-kewajiban harus ditafsirkan sedemikian rupa sehingga pengertian itu mencakupi hal-hal bahwa petindak, tidak ada kehendak atau maksud lagi untuk melakukan kewajiban-kewajiban dinas, untuk mana dia di didik, dilatih dan dibiayai oleh negara, serta bahwa petindak tidak ada maksud lagi untuk kembali ke kesatuannya karena kesadaran sendiri. (S. R. Sianturi. 2010:274-275).

b. Menghindari bahaya perang

Untuk penerapan Pasal 87 (1) ke-1, tidak dipersalkan mengenai keadaan, walaupun Pasal ini dapat saja diterapkan dalam waktu perang. Contoh kasus di Aceh terjadi pemberontakan bersenjata maka daerah tersebut keadaan waktu perang. Tetapi di Pulau Sulawesi aman-aman saja, apabila Sersan B dari Batalyon A yang berkedudukan di Makassar melarikan diri dari kesatuan tersebut sementara diketahuinya bahwa keesokharinya Batalyon akan diberangkatkan ke Aceh melawan pemberontak bersenjata maka Sersan B sudah dapat diterapkan pasal ini. (S. R. Sianturi. 2010:276).

c. Untuk menyeberang ke musuh

Untuk menyeberang ke musuh adalah maksud atau tujuan dari pelaku, yang baru dinyatakan dengan perbuatan pergi, apabila tujuannya itu belum tercapai (misalnya karena keburu tertangkap) sementara ia masih dalam perjalanan kemudian tujuan yang terkandung dalam hati pelaku itu dapat dibuktikan (misalnya karena ucapan sebelumnya kepada teman dekatnya), maka petindak telah melakukan desersi. Apabila kepergiannya itu telah sampai pada tujuannya yaitu sudah berada pada musuh, dan jika ia belum tertangkap, sebaiknya dia berdoa agar perang itu berlangsung setidaknya delapan belas tahun agar walaupun ia kembali setelah waktu tersebut tidak akan lagi dituntut karena kejahatan desersi tersebut Pasal 89 ke-1 KUHPM jo Pasal 78 KUHP. (S. R. Sianturi. 2010:276).

d. Memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu. Pengertian memasuki dinas militer tidak harus sama pengertiannya dengan yang ditentukan pada Bab VII buku I KUHPM. Tujuan pengkaitan istilah ini dengan istilah kekuasaan lain ialah agar apabila petindak bermaksud memasuki pasukan, laskar, partisan dan lain sebagainya dari suatu organisasi pemberontak bajak laut, sudah termasuk melakukan kejahatan desersi. Dicantumkan secara tegas kata-kata tanpa dibenarkan untuk itu, menyuruh kita berpikir apakah ada kemungkinan yang sebaliknya, dalam hal dibenarkan seorang militer memasuki dinas militer suatu negara atau kekuasaan lain, maka terhadap pelaku itu tidak dapat diterapkan pasal ini. (S. R. Sianturi. 2010:277).

Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM yang berbunyi : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari”.

Dalam satu sub ayat ini dirumuskan dan diancam pidana yang sama yaitu dua tahun delapan bulan, terhadap ketidakhadiran tanpa ijin

yang melewati batas waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 ke-1 dan Pasal 86 ke-1, walaupun unsur kejiwaannya berbeda. Dalam Pasal 85 ditentukan karena salahnya dan Pasal 86 dengan sengaja, sama-sama dalam waktu perang sama-sama diancamkan pidana maksimum delapan tahun dan enam bulan. Hal ini tentunya bukan untuk menyamakan "*delik culpa*" dengan "*delik dollus*" melainkan hanyalah menyederhanakan perumusan saja. Penentuan jangka waktu ketidakhadiran yang ditentukan dalam sub ayat ini adalah kelanjutan logis dari Pasal 85 dan Pasal 86, walaupun batas-batas waktu tersebut dikaitkan dengan perbedaan pasalnya menimbulkan kesamaan dasarnya, ditinjau dari sudut kepentingan hukum. Dengan perkataan lain penentuan batas waktu ketidakhadiran 30 hari termasuk sebagai kejahatan Pasal 85 ke-1 atau Pasal 86 ke-1, bandingkan ketidakhadiran 31 hari termasuk sebagai kejahatan desersi yang mengakibatkan pengancaman maksimum pidananya sangat berbeda adalah kurang menunjukkan suatu perimbangan. (S. R. Sianturi. 2010:277-278).

Hal lain yang perlu mendapat perhatian dalam rangka penerapan Pasal 87 (1) ke-2 ialah tentang kemungkinan perubahan keadaan sementara kejahatan itu sedang berjalan. Menurut ketentuan atau rumusan uu keadaan hanya ada dua macam yaitu dalam waktu damai atau dalam waktu perang, yang tidak mungkin berbarengan/bersamaan. Kejahatan desersi Pasal 87 (1) ke-2 jo ayat (2) jika 30 hari dalam waktu damai mengingat bahwa kejahatan dimulai (disengaja) pada keadaan dalam waktu damai dan kejahatan desersi Pasal 87 (1) ke-3 jo ayat (3) jika hari dalam waktu perang mengingat unsur kejiwaan petindak bermula dalam waktu perang. (Moch. Faisal Salam, 2006:219-222).

Pasal 87 ayat (1) ke-3 KUHPM yang berbunyi :“Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan pada Pasal 85 ke-2”.

Tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan seperti Pasal 85 ke-2. Perjalanan yang diperintahkan itu adalah perjalanan ke suatu tempat di luar Pulau dimana dia sedang berada. Dalam sub ayat ini tidak ditegaskan dalam keadaan yang bagaimana (dalam waktu damai atau dalam waktu perang) ketidakhadirannya itu berkelanjutan dengan mengakibatkan tidak ikut serta petindak dalam perjalanan tersebut. Jika tindakan ini dilakukan dalam waktu damai maka ancaman pidana tersebut ayat (2) yang diterapkan sedangkan dalam waktu perang maka ancaman tersebut ayat (3) (Moch. Faisal Salam, 2006:219-222).

Bentuk-bentuk desersi dalam perumusan Pasal 87 KUHPM dapat disimpulkan ada dua bentuk desersi yaitu :

- a. Bentuk desersi murni (Pasal 87 ayat (1) ke-1.
- b. Bentuk desersi sebagai peningkatan dari kejahatan ketidakhadiran tanpa ijin (Pasal 87 ayat (1) ke-2 dan ke-3). (S. R. Sianturi. 2010:272).

Ada empat macam cara atau keadaan yang dirumuskan sebagai bentuk desersi murni yaitu :

- b. Militer yang pergi dengan maksud untuk menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasny.
- c. Militer yang pergi dengan maksud untuk menghindari bahaya perang.
- d. Militer yang pergi dengan maksud untuk menyeberang ke musuh.
- e. Militer yang pergi dengan maksud untuk memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu (S. R. Sianturi. 2010:273).

Sebagaimana diketahui salah satu unsur dari tiap-tiap kejahatan adalah bersifat melawan hukum baik tersurat maupun tersirat diurumuskan, yang dimaksud dengan pergi adalah perbuatan menjauhkan diri dari, menyembunyikan diri dari, meneruskan ketidakhadiran pada atau, membuat diri tertinggal untuk sampai pada, suatu tempat atau tempat-tempat dimana militer itu seharusnya berada untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dinas yang ditugaskan kepadanya. Perbuatan pergi belum tentu

sudah merupakah perbuatan bersifat melawan hukum. Jika kepergian itu tanpa ijin sudah jelas sifat melawan hukum yaitu kata-kata “tanpa ijin” tersebut. Akan tetapi jika kepergiannya itu karena sudah mendapat ijin misalnya cuti, maka kepergiannya tidak bersifat melawan hukum. Jadi perbuatan pergi (perbuatan menjauhkan diri, menyembunyikan diri, meneruskan ketidakhadiran atau, membuat diri tertinggal) dilakukan dengan kesadaran atau sesuai dengan kehendaknya dalam hal ini adalah untuk mewujudkan maksudnya (S. R. Sianturi. 2010:273-274).

6. Tinjauan Tentang Ketentuan-Ketentuan Tindak Pidana Desersi

a. Dalam UU RI Nomor 39 Tahun 1947 tentang KUHPM yaitu :
Pasal 87 KUHPM ayat :

(1) Diancam karena desersi, militer :

Ke-1, Yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu;

Ke-2, Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari;

Ke-3, Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran ijin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan pada Pasal 85 ke-2.

(2) Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.

(3) Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan.

Pasal 88 KUHPM ayat :

(1) Maksimum ancaman pidana yang ditetapkan dalam Pasal 86 dan Pasal 87 diduakalikan :

Ke-1, Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak pelaku telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Ke-2, Apabila dua orang atau lebih, masing-masing untuk diri sendiri dalam melakukan salah satu kejahatan-kejahatan tersebut dalam Pasal 86 dan Pasal 87, pergi secara bersama-sama atau sebagai kelanjutan dari pemufakatan jahat.

b. Dalam UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu:

Pasal 124 UU No. 31 Tahun 1997 ayat :

(4) Dalam hal berkas perkara desersi yang tersangkanya tidak diketemukan, berita acara pemeriksaan tersangka tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara.

Pasal 125 UU No. 31 Tahun 1997 ayat :

(1) Kecuali perkara desersi yang tersangkanya tidak diketemukan sesudah meneliti berkas perkara, Oditur membuat dan menyampaikan pendapat hukum kepada Perwira Penyerah Perkara yang dapat berupa permintaan agar perkara diserahkan kepada Pengadilan atau diselesaikan menurut Hukum Disiplin Prajurit, atau ditutup demi kepentingan hukum, kepentingan umum, atau kepentingan militer.

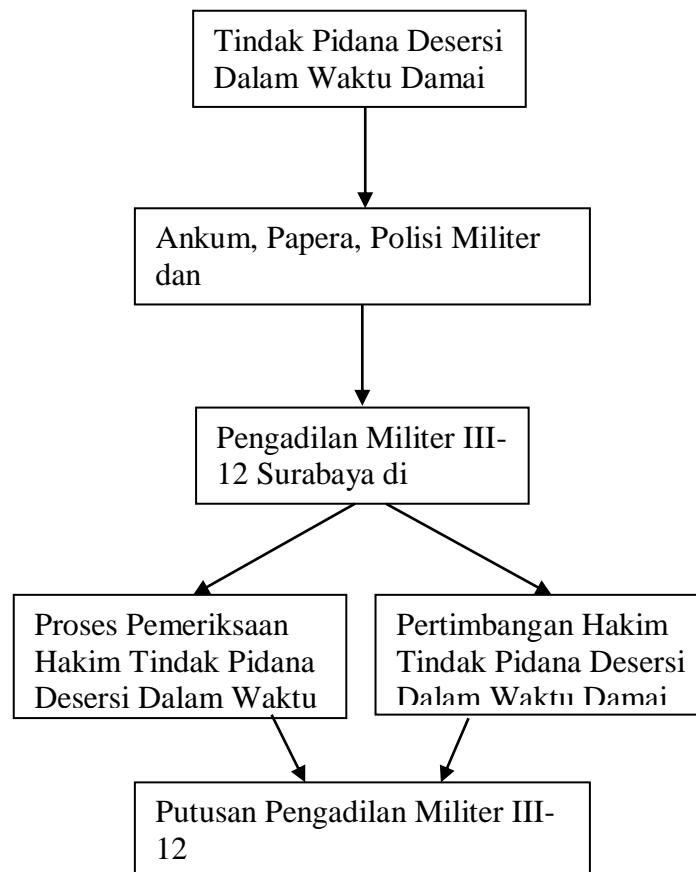
Pasal 141 UU No. 31 Tahun 1997 ayat :

(10) Dalam perkara desersi yang terdakwa tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya terdakwa.

Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997

Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.

f. Kerangka Pikiran



Keterangan :

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

Ketika Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) melakukan tindak desersi dalam waktu damai, dilakukan suatu penyidikan dan sebagai Penyidik dalam hukum acara pidana militer adalah terdiri dari Atasan Yang Berhak Menghukum (selanjutnya disingkat Angkum), Polisi Militer, dan Ouditur. Kemudian penyerahan perkara kepada pengadilan dalam lingkutan peradilan militer dilaksanakan oleh Perwira Penyerahan Perkara (Papera) dan dalam tahapan penuntutan dilaksanakan oleh Ouditur Militer.

Perkara yang telah diajukan ke Pengadilan Militer, dilaksanakan suatu proses pemeriksaan dakwaan, saksi-saksi, pelaku dan alat bukti yang diajukan oleh Ouditur Militer, sehingga Hakim Pengadilan Militer mengambil pertimbangan-pertimbangan dalam memutus tindak pidana desersi dalam waktu damai. Dalam proses penjatuhan putusan tersebut, seorang Hakim harus menyakini apakah seorang Terdakwa melakukan tindak pidana ataukah tidak, dengan berpedoman pada pembuktian untuk menentukan kesalahan dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pidana. Setelah menerima dan memeriksa suatu perkara, selanjutnya Hakim akan menjatuhkan keputusan. Jadi putusan Hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja, melainkan juga didasarkan pada hati nurani, dan pelaksanaan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penulis telah mencermati kajian Putusan Nomor : 147-K/ PM.III-12/ AD/ X/ 2014 tanggal 23 Oktober 2014 dalam perkara tindak pidana militer Disersi dalam waktu damai Dan terdapat beberapa hal penting yang perlu diketahui sebelum membahas permasalahan selanjutnya, yaitu sebagai berikut :

1. Kasus Posisi

Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel II tahun 2011 di Rindam VII/Wirabuana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian Terdakwa mengikuti kejuruan di Puduk Infanteri Bancee Sulawesi Selatan, selanjutnya Terdakwa ditempatkan di Brigif 3 Kariango Makasar, kemudian tahun 2012 Terdakwa dipindah tugaskan di Brigif Linud 18 Kostrad, selanjutnya awal tahun 2013 Terdakwa di tempatkan ke Yonif Linud 502/UyKostrad sampai dengan melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31120212780692. Terdakwa mendapat cuti pergi kerumah orang tuanya untuk menjenguk ibunya yang sedang sakit di rumah sakit makasar Sulawesi sejak tanggal 20 juli 2013 sampai dengan tanggal 27 juli 2013 kemudian terdakwa meminta ijin tambah kepada Danki B karena ibunya masih dirawat di rumah sakit untuk mengurus administrasinya , Bahwa terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan tersebut ,Bahwa selama terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah memberi tahu keberadaanya kekesatuannya baik surat maupun telepon. Terdakwa dengan sengaja telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Yonif Linud 502/18/2 Kostrad sejak tanggal 30 juli 2013 samapai dengan tanggal 15 februari 2014 atau selama 200 hari secara berturut-turut atau lebih lama 30 hari

2. Identitas Terdakwa

- a. nama lengkap : ASDAR
- b. Pangkat/ Nrp : Prada/ 31120212780692
- c. Jabatan : Tabakpan 5/2/III/502/18/2 Kostrad
- d. Kesatuan : Yonif Linud 502/18/2 Kostrad
- e. Tempat, Tanggal Lahir : Allesipito, 15 Juni 1992
- f. Jenis Kelamin : Laki-Laki
- g. Kewarganegaraan : Indonesia
- h. Agama : Islam
- i. Tempat Tinggal : Asrama Yonif Linud 502/18/2 Kostrad Jl Trisula Ds. Kemantren Kec. Jabung Kb. Malang

Terdakwa ditahan oleh :

Danyonif 502 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 27 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 20 Maret 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep / 02 / II / 2014 tanggal 27 Pebruari 2014 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 19 Maret 2014 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor : Kep / 03 / III / 2014 tanggal 19 Maret 2014 dari Danyonif 502 Kostrad selaku Ankum.

3. Surat Dakwaan Oditur Militer

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal tiga puluh bulan Juli tahun 2000 tiga belas sampai dengan tanggal dua puluh lima bulan Pebruari tahun 2000 empat belas secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli tahun 2000 tiga belas sampai bulan Pebruari tahun 2000 empat belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 tiga belas sampai dengan tahun 2000 empat belas bertempat di Yonif Linud 502/18/2 Kostard Malang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel II tahun 2011 di Rindam VII/Wirabuana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian Terdakwa mengikuti kejuruan di Pudik Infanteri Bancee Sulawesi Selatan, selanjutnya Terdakwa ditempatkan di Brigif 3 Kariango Makasar, kemudian tahun 2012 Terdakwa dipindah tugaskan di Brigif Linud 18 Kostrad, selanjutnya awal tahun 2013 Terdakwa di tempatkan ke Yonif Linud 502/UyKostrad sampai dengan melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31120212780692.
- b. Bahwa tedakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dai Juli 2013 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2014.
- c. Bahwa terdakwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, tidak diketahui keberadaannya dan apa kegiatannya karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui surat maupun telepon, dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian tempat-tempat yang biasa didatangi oleh Terdakwa di sekitar Kota Malang dan menghubungi ibu Terdakwa di Makasar, namun Terdakwa belum berhasil diketemukan.
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari DansatnyaTerdakwa tanggal 30 Juli 2013 berada di rumah Sdr, Terdakwa Serda Nasrudin anggota Yonif 512/Qy selama satu malam, kemudian Terdakwa diantar ke Terminal Arjosari Malang oleh Serda Nasirudin dan saat di terminal Terdakwa mendapat telepon dari seorang perempuan yang tidak dikenal mengatakan dengan bahasa Bugis “ Kalau Terdakwa berhenti jadi TNI AD dan meninggal dunia seperti bapakmu saya akan potong tedung(kerbau) “selanjutnya Terdakwa bingung dan naik bus ke Surabaya, kemudian naik kapal tujuan Makasar selama 1 (satu) malam, selanjutnya pergi ke Sanana Maluku Utara selama 3 (tiga) hari dengan kegiatan menunggu kapal ke Namlea Maluku Utara, kemudian Terdakwa bekerja ditambang

emas di Gogoria Namlea, selanjutnya Terdakwa tinggal di rumah Sdr. Sumantri di Namlea selama 2 (dua) bulan kemudian awal Pebruari 2014 Terdakwa pergi kerumah saudaranya yaitu Sdr. Fajar di BTP Blok A Kota Makasar selama dua Minggu dengan kegiatan hanya tinggal di tempat kos Sdr. Fajar dan jalan-jalan di Diskotik studio 33 Hotel Clarion Jl. AP Petaarani kota Makasar.

- e. Bahwa Terdakwa akhirnya pada tanggal 16 Pebruari 2014 saat jalanjalan bersama Sdr. Fajar ke diskotik studio 33 Hotel Clarion Jl. AP. Petaarani kota Makasar ditempat Parkir mau masuk diskotik Terdakwa ditangkap oleh petugas gabungan Polisi Militer, selanjutnya Terdakwa diamankan di Denpom VII/6 Makasar, kemudian Terdakwa di BAP dan dimasukkan sel sambil menunggu petugas dari Kesatuan Yonif Linud 502 Kostrad menjemput Terdakwa, selanjutnya tanggal 24 Pebruari 2014 petugas dari kesatuan yonif 502 Kostrad atas nama Letda Inf. Surono Patra dan Saksi-3 Serma Sahrullah datang menjemput Terdakwa ke Denpom VII/6 Makasar, kemudian Terdakwa di bawa ke Kesatuan dengan menggunakan pesawat Hercules, setelah sampai di Kesatuan Terdakwa di masukkan sel selama dua hari, selanjutnya di bawa ke Denpom V/3 Malang.
- f. Bahwa Terdakwa pada saat di amankan di Denpom VII/6 Makasar waktu Terdakwa diantar petugas jaga Denpom untuk buang air besar Terdakwa melarikan diri lari dan loncat tembok pagar pembatas Denpom VII/6 Makasar dan masuk kedalam ruang kelas sekolah dasar dan Terdakwa bersembunyi di flapon ruang atas sekolah dan petugas Denpom berhasil menangkapTerdakwa kembali.
- g. Bahwa latar belakang TerdakwaTerdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari ansatnya karena Terdakwa bingung dengan pindah tugas dari Brigif 3 Kariango Makasar ke Brigif Linud 18 Kostrad Jabung Malang, setelah Terdakwa pindah tugas ayah Terdakwa meninggal dunia, kemudian permasalahan ibu Terdakwa yang sedang

sakit serta Terdakwa yang mendapat telepon dari seorang perempuan yang tidak dikenal mengatakan dengan bahasa bugis” kalau Terdakwa berhenti jadi TNI AD dan meninggal dunia seperti bapakmu saya akan potong tedung (kerbau) sehingga Terdakwa menjadi bingung dan meninggalkan dinas.

- h. Bahwa terdakwa dengan sengaja telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif Linud 502/18/2 Kostrad sejak tanggal 30 Juli 2013 sampai tanggal 25 Pebruari 2014 atau selama 231 hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 hari.
- i. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Malang dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disipkan melaksanakan tugas operasi Militer atau ekspedisi.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 87 Ayat (1) ke 2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan

menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut:

- a. Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.
- b. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

18 (delapan belas) lembar daftar absensi Peleton II Kompi B Yonif Linud 502/18/2 Kostrad sejak bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Maret 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

4. Fakta Hukum

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel II tahun 2011 di Rindam VII/Wirabuana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian Terdakwa mengikuti kejuruan di Pusdik Infanteri Bancee Sulawesi Selatan, selanjutnya Terdakwa di tempatkan di Brigif 3 Kariango Makasar tugaskan di Brigif Linud 18 Kostrad, selanjutnya awal tahun 2013 Terdakwa di tempatkan ke Yonif Linud 502/18/2 Kostrad sampai dengan melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31120212780692.
- b. Bahwa benar pada tanggal 18 Juli 2013 Terdakwa mendapat berita dari Kesatuan Yonif 502/18/2 Kostrad yang meginformasikan bahwa Ibu Terdakwa sakit dan sedang dirawat di Rumah Sakit Makasar, selanjutnya atas berita tersebut Terdakwa mengajukan ijin Cuti ke Makasar, setelah mendapatkan ijin cuti selama 1 (satu) minggu sejak tanggal 20 Juli 2013 sampai dengan tanggal 27 Juli 2013.
- c. Bahwa benar kemudian pada tanggal 20 Juli 2013 Terdakwa berangkat menuju Makasar untuk menengok Ibunya yang sedang di rawat di Rumah Sakit Makasar, namun karena Ibunya masih dirawat dan Terdakwa hendak menyelesaikan administrasi di Rumah Sakit Terdakwa menelpon Danki B untuk menambah ijin cutinya dan oleh Danki B diberikan tambahan ijin cuti selama 2 (dua) hari.
- d. Bahwa benar setelah ijin cuti tambahan selama 2 (dua) hari berakhir, Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan, akan tetapi pada tanggal 20 Juli 2013 Terdakwa berangkat dari Makasar menuju ke Malang ke rumah

Sdr. Terdakwa yang bernama Serda Nasirudin anggota Yonif 512/18/2 Kostrad dan menginap selama 1 (satu) malam, kemudian Terdakwa diantar ke Terminal Arjosari Malang oleh Serda Nasirudin dan menyarankan agar Terdakwa kembali ke Yonif 502/UY/18/2 Kostrad, sesampainya di terminal Terdakwa mendapat telepon dari seorang perempuan yang tidak dikenal mengatakan dengan bahasa bugis “Kalau Terdakwa berhenti jadi TNI AD dan meninggal dunia seperti bapakmu saya kan potong tedung (kerbau)” selanjutnya Terdakwa bingung dan naik bus ke Surabaya, kemudian naik kapal tujuan Makasar selama 1 (satu) hari satu malam, kemudian ke Bau-bau Maluku selama satu hari satu malam, selanjutnya pergi ke Sanana Maluku Utara selama 3 (tiga) hari dengan kegiatan menunggu kapal ke Namlea Maluku Utara, kemudian Terdakwa bekerja ditambang emas di Gogoria Namlea, selanjutnya Terdakwa tinggal di rumah Sdr. Sumantri di Namlea selama 2 (dua) bulan kemudian awal Pebruari 2014 Terdakwa pergi kerumah saudaranya yaitu Sdr. Fajar di BTP Blok A kota Makasar selama dua Minggu dengan kegiatan hanya tinggal ditempat kos Sdr. Fajar dan jalan-jalan di Diskotik studio 33 Hotel Clarion Jl. AP Petaarani kota Makasar.

- e. Bahwa benar pada tanggal 15 Pebruari 2014 saat jalan-jalan bersama Sdr. Fajar ke diskotik studio 33 hotel Clarion Jl AP Petaarani kota Makasar ditempat parkir mau masuk diskotik Terdakwa di tangkap oleh petugas gabungan Polisi Militer, selanjutnya Terdakwa diamankan di Denpom VII/6 Makasar, kemudian Terdakwa di BAP dan dimasukkan sel sambil menunggu petugas dari Kesatuan Yonif Linud 502 Kostrad menjemput Terdakwa, selanjutnya tanggal 24 Pebruari 2014 petugas dari Kesatuan Yonif 502 Kostrad atas nama Letda Inf Surono Patra dan Serma Sharullah datang menjemput Terdakwa ke Denpom VII/6 Makasar, kemudian Terdakwa di bawa ke Kesatuan dengan menggunakan pesawat Hercules. Setelah sampai di

Kesatuan Terdakwa di masukkan sel selama dua hari, selanjutnya dibawa ke Denpom V/3 Malang.

- f. Bahwa benar pada saat dia amankan di Denpom VII/6 Makasar saat Terdakwa diantar petugas jaga Denpom untuk buang air besar Terdakwa melarikan diri lari dan loncat tembok pagar pembatas Denpom VII/6 Makasar dan masuk kedalam ruang kelas sekolah dasar dan Terdakwa bersembunyi di Flapon ruang atas sekolah dan petugas Denpom berhasil menangkap Terdakwa kembali.
- g. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tidak diketahui keberadaannya dan apa kegiatannya karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui surat maupun telepon, dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke tempat-tempat yang biasa didatangi oleh Terdakwa di sekitar kota Malang dan menghubungi ibu Terdakwa di Makasar, namun Terdakwa belum berhasil diketemukan.
- h. Bahwa benar pada saat dia amankan di Denpom VII/6 Makasar saat Terdakwa diantar petugas jaga Denpom untuk buang air besar Terdakwa melarikan diri lari dan loncat tembok pagar pembatas Denpom VII/6 Makasar dan masuk kedalam ruang kelas sekolah dasar dan Terdakwa bersembunyi di Flapon ruang atas sekolah dan petugas Denpom berhasil menangkap Terdakwa kembali.
- i. Bahwa benar latar belakang Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena Terdakwa bingung dengan pindah tugas dari Brigif 3 Kariango Makasar ke Brigif Linud 18 Kostrad Jabung Malang, setelah Terdakwa pindah tugas ayah Terdakwa meninggal dunia kemudian permasalahan ibu Terdakwa yang sedang sakit serta Terdakwa yang mendapat telepon dari seorang perempuan yang tidak dikenal mengatakan dengan bahasa bugis “ kalau Terdakwa berhenti jadi TNI AD dan meninggal dunia seperti bapakmu saya akan potong tedung (kerbau)” sehingga Terdakwa menjadi bingung dan meninggalkan dinas.

- j. Bahwa benar Terdakwa dengan sengaja telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif Linud 502/18/2 Kostrad sejak tanggal 30 Juli 2013 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2014 atau selama 200 (dua ratus) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
 - k. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah ikut apel pagi maupun apel siang dan selama itu pula Terdakwa tidak pernah menerima gaji.
 - l. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Malang dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer.
5. Pertimbangan Hakim
- a. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya meninggalkan kesatuan tanpa ijin diawali Terdakwa merasa bingung setelah dipindah tugaskan dari Brigif 3 Kariango Makasar ke Brigif Linud 18 Kostrad Jabung Malang, setelah terdakwa pindah tugas ayah Terdakwa meninggal dunia kemudian permasalahan ibu Terdakwa yang sedang sakit serta Terdakwa yang mendapat telepon dari seorang perempuan yang tidak dikenal mengatakan dengan bahasa bugis “ kalau Terdakwa berhenti jadi TNI AD dan meninggal dunia seperti bapakmu saya akan potong tedung (kerbau)”, hal ini mencerminkan bahwa Terdakwa memiliki kadar disiplin yang rendah serta mempunyai sifat lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinasny.
 - b. Bahwa pada hakekatnya merupakan cara dari Terdakwa untuk menghindari dari pelaksanaan tugas, baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
 - c. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terbelenggalnya tugas yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa, yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tugas pokok serta dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuan.

Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- b. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- c. Terdakwa belum pernah dihukum.
- d. Terdakwa masih muda sehingga masih dapat dibina menjadi Prajurit yang baik.

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
- b. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
- c. Tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi terabaikan.
- d. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap.

6. Putusan Hakim

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Asdar Prada NRP 31120212780692; terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai“.
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama selama 6 (enam) bulan 20 (duapuluh) hari.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

18 (delapan belas) lembar daftar absensi Peleton II Kompi B Yonif Linud 502/18/2 Kostrad sejak bulan Juli 2013 sampai bulan Maret 2014

- d. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

B. Pembahasan

1. Kesesuaian Acara Pemeriksaan Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Malang memutus Tindak Pidana Desersi Dalam Waktu Damai Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dalam pergaulan hidup masyarakat, baik dalam lingkungan yang kecil maupun lingkungan yang lebih besar, agar di dalamnya terdapat suatu keserasian, suatu ketertiban, suatu kepastian hukum dan sebagainya. Akan tetapi di dalam satu hal hukum pidana itu menunjukkan adanya suatu perbedaan dari hukum-hukum yang lain pada umumnya, yaitu bahwa di dalamnya orang mengenal adanya suatu kesengajaan untuk memberikan suatu akibat hukum berupa suatu *bijzondere leed* atau suatu penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk suatu hukuman kepada mereka yang telah melakukan suatu pelanggaran terhadap keharusan-keharusan atau larangan-larangan yang telah ditentukan di dalamnya. Adanya suatu penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk suatu pidana itu sudah pasti tidak dapat dihindarkan di dalam bagian-bagian yang lain dari hukum pada umumnya, yaitu apabila orang menginginkan agar norma-norma yang terdapat di dalamnya benar-benar akan ditaati oleh orang.

Istilah *Strafbaarfeit* oleh beberapa ahli hukum Indonesia diterjemahkan dengan istilah yang berbeda-beda. Dalam KUHP dikenal istilah *Strafbaarfeit*, atau yang dalam ilmu pengetahuan hukum disebut delik. Sedangkan pembuat Undang-Undang dalam merumuskan Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. *Strafbaarfeit* sendiri berarti suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundangan, jadi yang diancam pidana adalah manusia, sehingga banyak ahli hukum yang mengartikan.

Terhadap penyelesaian perkara militer yang diajukan ke Pengadilan Militer, terdapat beberapa macam acara pemeriksaan dalam

persidangan yaitu acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan cepat, acara pemeriksaan singkat, acara pemeriksaan perkara koneksitas, acara pemeriksaan tata usaha militer, dan acara pemeriksaan *in absentia* pada prinsipnya dilakukan terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana militer murni seperti desersi yang dalam jangka waktu yang telah ditentukan tidak dapat diketemukan sehingga acara pemeriksaan persidangan dilakukan tanpa kehadiran terdakwa.

Desersi merupakan salah satu kejahatan yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan desersi adalah tidak hadir tanpa adanya izin, atau disebut juga melarikan diri dari masa dinasny dengan sengaja. Di dalam tindak pidana desersi terdapat beberapa unsur dakwaan Oditur militer, yaitu :

- a. Unsur militer;
- b. Unsur dengan sengaja;
- c. Unsur melakukan ketidak hadiran tanpa izin;
- d. Unsur dimasa damai;
- e. Unsur lebih lama tiga puluh (30) hari.

Tindak pidana desersi yang diperiksa dengan hadirnya Terdakwa dalam waktu damai adalah tindak pidana/perkara desersi yang terdakwa yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasny, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh, atau memasuki dinasi militer pada suatu Negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama 30 hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari, dalam pemeriksaan dilaksanakan dengan hadirnya hadirnya terdakwa dapat dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sehingga dapat dipertegas lagi, bagi personel prajurit Tentaara Nasional Indonesia yang pergi meninggalkan dinasny lebih dari tiga puluh hari tanpa izin dapat dikenakan sanksi yaitu :

Menurut ketentuan Pasal 87 ayat (2) KUHPM, yaitu :“Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan” Dari pengertian dan pasal tersebut di atas dapat kita pahami bahwa apabila di kesatuan ditemukan personel prajurit Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat TNI) tidak hadir tanpa ijin yang sah berturut-turut lebih lama dari 30 hari dalam waktu damai dan lebih lama dari 4 hari dalam masa perang maka satuan berkewajiban memberikan laporan secara berjenjang ke Komando atas disertai upaya pencarian dan dapat minta bantuan kepada Polisi Militer, maka Atasan Yang Berhak Menghukum (selanjutnya disingkat Ankum) yang bersangkutan berkewajiban memberikan laporan atau melimpahkan kasus tersebut kepada penyidik Polisi Militer. Penyidik Polisi Militer akan melakukan pemeriksaan berupa penyidikan untuk mencari dan menemukan alat bukti, disamping itu penyidik juga akan mencari saksi-saksi dibantu Provost kesatuan serta staf personel kesatuan terdakwa.

Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-saksi yang ada guna di dengar keterangannya dan menuangkan keterangan tersebut ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disingkat BAP) dan setelah dinyatakan lengkap maka penyidik melimpahkan berkas tersebut ke Oditur Militer. Setelah itu Oditur Militer akan mempelajari dan meneliti apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum. Sesudah meneliti berkas, Oditur Militer membuat dan menyampaikan pendapat hukum kepada Perwira Penyerah Perkara (selanjutnya disingkat Papera) yang dapat berupa permintaan agar perkara diserahkan kepada Pengadilan. Namun perkara desersi karena sudah merupakan tindak pidana maka Papera mengeluarkan surat berupa penerbitan Surat Keputusan Pelimpahan Perkara (selanjutnya disingkat Skeppera) oleh Papera kepada Oditur Militer sebagai dasar pelimpahan dan penuntutan perkara tersebut ke Pengadilan Militer. Dalam Acara pemeriksaan perkara desersi pada umumnya sama dengan pemeriksaan perkara pidana lainnya. Pada sidang pertama dibuka oleh Hakim Ketua dengan diikuti ketukan palu 3 (tiga)

kali, pemeriksaan saksi-saksi, alat bukti dan Terdakwa serta sampai mengambil keputusan.(Hasil wawancara 25 Juni 2015 dengan Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya, Letkol Chk Nrp. 1910002230362 Muh. Mahmud, S.H., M.H.).

Berkaitan dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) di lingkungan Pengadilan Militer adalah wewenang dari Oditur Militer, hal ini sesuai dengan tugas dan wewenang dalam Pasal 64 ayat (1) ke-b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu melaksanakan penetapan Hakim atau putusan Pengadilan dalam lingkungan peradilan Militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dalam hal perkara desersi yang diperiksa secara hadirnya Terdakwa telah diputus maka putusan Pengadilan Militer tersebut akan diumumkan kepada seluruh prajurit TNI, Kepala Dinas/Jawatan di wilayah hukum Pengadilan Militer bahwa nama terdakwa sebagaimana ada dalam surat lampiran pengumuman tersebut perkaranya telah diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan. Kemudian Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap ke Kepaniteraan Pengadilan Militer tanpa diajukan permohonan banding, maka terdakwa tersebut dianggap menerima putusan Pengadilan Militer. Kemudian setelah itu Panitera membuat pengumuman atas putusan tersebut dengan cara ditempelkan pada papan pengumuman pengadilan dengan mencantumkan hak-hak terdakwa. Hak terdakwa atau Penasihat Hukumnya dapat mengajukan upaya hukum berupa banding. Kemudian pada saat pengumuman putusan Panitera membuat Berita Acara Penempelan pengumuman.

Menurut penelitian yang dilakukan penulis bahwa pelaku tindak pidana desersi dalam waktu damai dengan hadirnya Terdakwa dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama tiga puluh hari diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun

delapan bulan. Hal ini dikarenakan selain dari ketentuan perundang-undangan yang ada juga ditambah aturan-aturan yang berlaku khusus di institusi TNI. Kejahatan desersi ini dipandang sebagai kejahatan militer yang sangat berdampak sosiologis pada kehidupan berbangsa secara umum dan Institusi TNI secara khusus (Hasil wawancara 25 Juni 2015 dengan Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya selaku Panitera, Kapten Chk Nrp 21940135750872 Dedi Wigandi, S.Sos, S.H.).

Pelaksanaan pidana penjara bagi seorang narapidana kejahatan desersi dalam waktu damai dengan hadirnya Terdakwa cukup ditahan di Rumah Tahanan Militer. Secara hukum wewenang mencari dan menemukan seorang *Desertir* adalah Oditur namun untuk mempercepat proses penyelesaian pidana maka dibantu oleh Polisi Militer dan satuan terpidana. Sehingga dengan tertangkapnya *Desertir* tersebut dapat segera menjalani pidana pokoknya sehingga tujuan dari pemidanaan itu sendiri tercapai yang pada akhirnya setelah selesai menjalani pidana maka *Desertir* tersebut dapat diterima kembali di masyarakat.

Tindak pidana desersi merupakan tindak pidana yang secara khusus dilakukan oleh seorang anggota militer. Dalam KUHPM tindak pidana desersi diatur dalam Pasal 87 dengan rumusan sebagai berikut:

Diancam karena desersi, militer:

Ke-1 Yang pergi dengan maksud untuk menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinas, menghindari bahaya perang, menyeberang kemusuh atau memasuki dinas militer pada suatu Negara, atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.

Ke-2 Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari.

Ke-3 Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan pada Pasal 85 ke-2.

Apabila kita cermati substansi rumusan pasal tersebut, sesuai dengan penempatannya dibawah judul mengenai ketentuan cara bagi seorang prajurit untuk menarik diri dari pelaksanaan kewajiban dinas, maka dapat dipahami bahwa hakekat dari tindak pidana desersi harus dimaknai bahwa pada diri prajurit yang melakukan desersi harus tercermin sikap bahwa ia tidak ada lagi keinginannya untuk berada dalam dinas militer.

Sikap tersebut dapat saja terealisasikan dalam perbuatan yang bersangkutan pergi meninggalkan kesatuan dalam batas tenggang waktu minimal 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut atau perbuatan menarik diri untuk selamanya. Bahwa dalam kehidupan sehari-hari, seorang militer dituntut kesiapsiagaannya ditempat dimana ia harus berada, tanpa itu sukar dapat diharapkan dari padanya untuk menjadi militer yang mampu menjalankan tugasnya.

Dalam hal ini penulis telah mempelajari dan menelaah perkara tindak pidana desersi dalam waktu damai dengan hadirnya Terdakwa, dalam proses pemeriksaan persidangan terhadap Terdakwa pelaku tindak pidana desersi dalam waktu damai, yang pelaksanaannya dengan mempedomani Kitab Undang Hukum Pidana Militer dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Peradilan Militer.

2. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya memutus Tindak Pidana Desersi Dalam Waktu Damai Dengan Pasal 171 Jo 199 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Dalam doktrin hukum pidana sesungguhnya ada yang dapat dijadikan pedoman untuk sementara waktu sebelum KUHP Nasional diberlakukan. Pedoman tersebut terdapat dalam konsep KUHP baru Pasal 55 ayat (1), yaitu:

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. Sikap batin pembuat tindak pidana;

- d. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana;
- e. Cara melakukan tindak pidana;
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana;
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- j. Pemaafan dari korban atau keluarganya;
- k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana maka perbuatan pelaku harus mengandung unsur kesalahan, hal ini berdasarkan asas kesalahan *Geen Straf Zonder Schuld* (tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum tanpa ada kesalahan). Berdasarkan hal tersebut, dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku hakim harus melihat kepada kesalahan yang dilakukan oleh pelaku sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Selain itu dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku hakim juga melihat kepada motif, tujuan, cara perbuatan dilakukan dan dalam hal apa perbuatan itu dilakukan (perbuatan itu direncanakan). Dalam konsep KUHP baru berdasarkan Pasal 55 menyatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku selain melihat kepada aspek pelaku dan perbuatan, hakim juga harus melihat dan mempertimbangkan kepada aspek lain yakni melihat aspek akibat, korban dan juga keluarga korban. Hal ini merupakan konsep baru yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana, karena perbuatan pidana yang dilakukan selain berdampak kepada pelaku, hal ini juga berakibat kepada korban dan juga keluarga korban.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya apabila terjadi suatu perbuatan pidana, maka korban dan keluarga korban tidak bisa dikesampingkan, artinya pelaku selalu berhubungan dengan korban dan juga keluarga korban, sehingga dengan demikian rasa keadilan dan keamanan di tengah-tengah masyarakat dapat terwujud. Sehingga apabila

hakim dalam menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan konsep-konsep pidana baru tersebut, maka dengan demikian korban dan keluarga korban bisa diperhatikan, sehingga korban dan keluarga korban bukan hanya sebagai objek saja tetapi juga sebagai subjek yang harus dipertimbangkan.

Semua konsep tersebut di atas merupakan konsep dalam KUHP terhadap hakim yang mengadili perbuatan pidana yang tersebar dalam KUHP. Ketika perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh anggota militer terhadap tindak pidana desersi, maka dalam hal ini, dalam menjatuhkan hukuman kepada anggota yang melakukan kejahatan tersebut hakim hanya mempertimbangkan kepada aspek pelaku dan perbuatannya, hal ini disebabkan karena perbuatan yang dilakukan pelaku tidak berhubungan dengan korban, karena desersi merupakan perbuatan pidana yang berhubungan dengan pelanggaran terhadap kode etik kedisiplinan. Artinya desersi atau perbuatan pidana yang dilakukan anggota Tentara Nasional Indonesia merupakan suatu perbuatan pelanggaran terhadap kode etik yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut, dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku, hakim tidak memperhatikan kepada aspek korban dan keluarga korban tetapi hanya melihat dan mempertimbangkan kepada aspek pelaku dan perbuatannya saja.

Namun dalam hasil penelitian yang didapat, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana desersi adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya meninggalkan kesatuan tanpa izin diawali Terdakwa merasa bingung setelah dipindah tugaskan dari Brigif 3 Kariango Makasar ke Brigif Linud 18 Kostrad Jabung Malang, setelah terdakwa pindah tugas ayah Terdakwa meninggal dunia kemudian permasalahan ibu Terdakwa yang sedang sakit serta Terdakwa yang mendapat telepon dari seorang perempuan yang tidak dikenal mengatakan dengan bahasa bugis “ kalau Terdakwa berhenti jadi TNI AD dan meninggal dunia

seperti bapakmu saya akan potong tedung (kerbau)”, hal ini mencerminkan bahwa Terdakwa memiliki kadar disiplin yang rendah serta mempunyai sifat lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinasnya.

- b. Bahwa pada hakekatnya merupakan cara dari Terdakwa untuk menghindari dari pelaksanaan tugas, baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
- c. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa, yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tugas pokok serta dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuan.

Hal-hal yang memberatkan pada terdakwa yang melakukan tindak pidana desersi antara lain:

- a. Bahwa terdakwa bertentangan dengan sapta marga dan sumpah prajurit;
- b. Bahwa perbuatan terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuannya;
- c. Bahwa perbuatan terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggung jawab.

Sedangkan bagi terdakwa tindak pidana desersi yang menyerahkan diri kepada kesatuannya atau terdakwa mengikuti jalan persidangan sehingga adanya pertimbangan hakim yang meringankan hukuman yang kepadanya, yaitu:

- a. Terdakwa belum pernah dihukum;
- b. Terdakwa berterus terang di pengadilan;
- c. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- d. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan menyerahkan diri.

Hakim dalam memutus suatu perkara akan mempertimbangkan putusannya sesuai dengan teori dalam penjatuhan putusan yaitu teori keseimbangan. Menurut KUHAP Pasal 1 ayat (8), Hakim merupakan

pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili sehingga hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, karenanya peranan dan kedudukan hakim dijamin oleh undang-undang. Begitu pula juga dengan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu : “Hakim Militer, Hakim Militer Tinggi, Hakim Militer Utama, yang selanjutnya disebut Hakim adalah pejabat yang masing-masing melaksanakan kekuasaan kehakiman pada pengadilan”.

Putusan yang dijatuhkan harus memiliki dasar dan pertimbangan yang kuat sehingga dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Dalam putusan hakim aspek pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan hal yang paling penting, dimana pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap putusan hakim. Pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum. Oleh karena itu, diharapkan pada putusan hakim ditemukan pencerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran, dapat dipertanggungjawabkan kepada pencari keadilan, ilmu hukum itu sendiri, hati nurani hakim dan masyarakat pada umumnya serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut pendapat penulis, setelah melakukan penelitian, terhadap putusan pengadilan terhadap tindak pidana diserse dalam waktu damai pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Malang Nomor : 147-K/PM-III-12/AD/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014 pada saat pelaksanaan persidangan dihadiri oleh Terdakwa, setelah dilakukannya proses persidangan melalui pemeriksaan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti, maka hakim dapat memutus setelah mengambil pertimbangan-pertimbangan, berdasarkan fakta yuridis, fakta persidangan dan fakta sosiologis, sehingga hakim dapat memutus dengan arif dan bijaksana.

Putusan tindak pidana desersi dalam waktu damai dengan hadirnya Terdakwa yang penulis teliti pada perkara yang ada di Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diputuskan sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yaitu perbuatan yang di larang oleh Undang-undang itu benar telah dilakukan dan dapat di pertanggung jawabkan oleh Terdakwa serta tidak adanya alasan yang menghapuskan pidana, alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana. Dalam Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997, yaitu :

Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menurut hemat penulis pada Pasal tersebut di atas, pada kalimat “ Serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa “, ada kalimat “dapat”, berarti bisa dilaksanakan, begitu pula jika Terdakwanya hadir juga dapat dilaksanakan persidangan terhadap tindak pidana desersi dalam waktu damai seperti yang terdapat pada Pasal 144 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer, memang secara tersurat tidak terlihat, tetapi secara tersirat pelaksanaan tindak pidana desersi dalam waktu damai dilaksanakan dengan hadirnya Terdakwa telah sesuai dengan :

Pasal 171 UU RI Nomor 31 Tahun 1997, yaitu :

Hakim Tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Dalam putusan yang peneliti kaji yaitu Putusan Nomor : 147-K/PM-III-12/AD/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014 dalam perkara tindak pidana Desersi dalam waktu damai, selain terdakwa sendiri mengakui tindak pidana desersi tersebut juga terdapat bukti yang menguatkan. Berdasarkan putusan tersebut terdapat 18 (delapan belas) lembar daftar absensi Peleton II Kompi B Yonif Linud 502/18/2 Kostrad senjak bulan Juli 2013 sampai bulan Maret 2014, serta keterangan 3 saksi yang dapat menguatkan bahwa terdakwa terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana desersi.

Pasal 199 UU RI Nomor 31 Tahun 1997, yaitu :

- (1) Untuk menetapkan apakah Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang akan mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (1), diadakan penelitian bersama oleh Jaksa/Jaksa Tinggi dan Oditur atas dasar hasil penyelidikan tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (2).
- (2) Pendapat dari penelitian bersama itu terdapat dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila dalam penelitian bersama itu terdapat persesuaian pendapat tentang Pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut, hal itu dilaporkan oleh Jaksa/Jaksa Tinggi kepada Jaksa Agung dan oleh Oditur kepada Oditur Jenderal.

Penulis telah mencermati dan meneliti perkara tindak pidana desersi dalam waktu damai dengan hadirnya Terdakwa pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya di Malang telah melaksanakan sesuai dengan Pasal-Pasal tersebut di atas, sehingga dengan ketentuan tersebut di atas Hakim dapat mengambil pertimbangan-pertimbangan dan memutus dalam perkara tindak pidana desersi dalam waktu damai dengan hadirnya Terdakwa.

Mengenai bentuk penjatuhan pidana yang diberikan kepada Terdakwa yang hadir dalam persidangan pada tindak pidana diserse dalam

waktu damai terhadap putusan Nomor : 147-K/PM-III-12/AD/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014, berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Peradilan Militer dengan di jatuhkannya pidana penjara seperti yang terdapat dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo Pasal 87 ayat (2) KUHPM telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menurut Penulis pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana diserse dalam waktu damai tentunya memiliki banyak pertimbangan. Sehingga tuntutan Oditur Militer yang diberikan kepada Terdakwa. Menurut hakim yang menangani tindak pidana ini oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Malang saat diwawancarai Penulis, putusan ini menurut beliau sudah cocok. Putusan tersebut dijatuhkan sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yaitu perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang itu benar telah dilakukan dan dapat di pertanggungjawabkan oleh Terdakwa serta tidak adanya alasan yang menghapuskan pidana.

Dari hal di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan pidana terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan desersi, terdakwa tidak selalu diberikan hukuman tambahan, oleh karena adanya niat yang baik dari terdakwa dalam untuk menyerahkan diri ke kesatuannya atau mengikuti proses persidangan, sedangkan bagi terdakwa yang in absensia pada proses persidangan biasanya akan diberikan hukuman tambahan oleh hakim. Dalam hal ini, hakim juga dapat menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana desersi yang in absensia, selanjutnya dalam menjatuhkan putusan tindak pidana desersi, hakim menjadikan in absensia sebagai suatu alasan untuk mempertimbangkan hal-hal yang baik atau meringankan dan hal-hal yang buruk atau yang memberatkan.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Acara Pemeriksaan Persidangan Terhadap Terdakwa Pelaku Tindak Pidana Disersi Dalam Waktu Damai Telah Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Pada proses acara pemeriksaan Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan upaya sesuai dengan proses hukum yang berlaku namun terdakwa berhasil diketemukan, kasus tersebut dilimpahkan kepada penyidik Polisi Militer untuk melakukan pemeriksaan berupa penyidikan dalam mencari dan menemukan alat bukti. Setelah berkas dinyatakan lengkap, penyidik melimpahkan berkas tersebut ke Oditur Militer untuk dilimpahkan ke Pengadilan. Oleh karena ini merupakan tindak pidana maka perkara tersebut dilimpahkan melalui Surat Keputusan Pelimpahan Perkara (Skeppera) dari Panglima Kodam selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera). Setelah diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dan dibacakan di depan Pengadilan yang terbuka untuk umum, maka pengadilan membuat pengumuman tentang putusan tersebut dan pembuatan akta putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka Oditur Militer III-12 Surabaya menyampaikan petikan putusan atas nama terdakwa kepada Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankumnya), semua proses acara pemeriksaan tersebut telah sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
2. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Militer Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Disersi Dalam Waktu Damai Telah Sesuai Dengan Pasal 171 Jo 199 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Putusan yang dijatuhkan harus memiliki dasar dan pertimbangan yang kuat sehingga dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Dalam putusan hakim aspek pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan hal yang paling penting,

dimana pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap putusan hakim. Pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwaakan oleh penuntut umum. Oleh karena itu, diharapkan pada putusan hakim ditemukan pencerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran, dapat dipertanggungjawabkan kepada pencari keadilan, ilmu hukum itu sendiri, hati nurani hakim dan masyarakat pada umumnya serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, selain fakta yuridis yang menjadi bahan pertimbangan juga diambil pertimbangan fakta persidangan dan pertimbangan non yuridis berdasarkan fakta sosiologis dari diri terdakwa sehingga hakim dapat memutus dengan arif dan bijaksana. Putusan tindak pidana desersi dalam waktu damai dengan hadirnya Terdakwa yang penulis teliti pada perkara yang ada di Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diputuskan sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yaitu perbuatan yang di larang oleh Undang-undang itu benar telah dilakukan dan dapat di pertanggung jawabkan oleh Terdakwa serta tidak adanya alasan yang menghapuskan pidana, alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa.

B. Saran

1. Penerapan peraturan yang ada dan konsekuensinya agar dilakukan secara konsisten dengan harapan oknum prajurit yang melanggar mendapat efek jera dan tidak ada toleransi sehingga tidak ditiru sekaligus memberi pelajaran yang sangat berharga terhadap prajurit lainnya.
2. Selalu mengadakan pengkajian terhadap perkara-perkara desersi untuk dapat mengetahui sebab dan dampak yang ditimbulkan sehingga dapat secepat mungkin mencari solusi/jalan keluar dalam mengurangi kuantitas tindak pidana desersi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sapta Artha Jaya
- Amirroedin Syarif. 1996. *Hukum Disiplin Militer*. Jakarta : Rineka Cipta
- A. Mulya Sumaperwata. 2007. *Hukum Acara Peradilan Militer*. Bandung : Pasundan Law Faculty Alumnus Press
- Bambang Sunggono. 2004. *Peradilan Militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- _____. 2006. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Martiman Prodjohamidjojo. 1996. *Pemeriksaan di Persidangan Pengadilan Seri Pemerataan Keadilan*. Bandung : CV. Mandar Maju
- Moch. Faisal Salam. 1996. *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*. Bandung : CV. Mandar Maju
- _____. 2006. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Bandung : CV. Mandar Maju
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Soesilo Yuwono. 1982. *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP, Sistem dan Prosedur*. Bandung : Alumni

Surjono Sutarto.1987. *Sari Hukum Acara Pidana*. Semarang : Yayasan Cendikiawan Purna Dharma

S. R. Sianturi. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, 2010.

Harold Hongju Koh. 2002. *The Case Against Military Commissions*. Vol. 96, No. 02 (Apr. 2002) PP. 337-344. *The American Journal of Internasional Law*

Haryo Sulistiriyanto. 2011. *Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi*. Vol. XVI No. 02. 2011 edisi April. *Perspektif*.

Robi Amu. 2012. *Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi*. Vol. 05 No. 01. *Jurnal Legalitas*

Peraturan Perundang-undangan :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-Undang No. 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit.
8. Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/5/II/2009 tentang Petunjuk Administrasi Oditurat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
9. Surat Keputusan Panglima Angkatan Bersenjata Nomor 711 Tahun 1989 tentang Pedoman Penyelesaian Tindak Pidana di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Kamus :

Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,
edisi ketiga, Jakarta: Balai Pustaka